repository.ub.ac.id

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN (JALIN MATRA PFK) DI DESA PAKISAJI KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MALIA DIAH WIJAYANTI

NIM. 155030107111011

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2019

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya ALLAH beserta orang-orang yang sabar"

(Al-Baqarah: 153)

"sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya, yakin usaha sampai. Karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan hanya menginginkan hasil akhir dan beres tapi harus selalu *keep on progress*. Meskipun kenyatannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stress percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses". (Malia) .

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

Disusun Oleh : Malia Diah Wijayanti

NIM : 155030107111011

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 20 Mei 2019

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP	Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M. Pol.Sc
NIP. 19770101 200502 2 001	NIP. 19870426 201504 1002

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 16 Juli 2019
Waktu	: 12.00 – 13.00
Skripsi atas nama	: Malia Diah Wijayanti
Judul	: Evaluasi Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) Di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

Dan dinyatakan LULUS.

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP.	**Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol.Sc**
NIP. 19770101 200501 2 001	**NIP. 19870426 201504 1 001**

Anggota	Anggota
Dr. Mohammad Rozikin, M.AP	**Aulia Puspaning Galih, SIIP., MS.**
NIP. 19630503 198802 1 001	**NIK. 2016079101202001**

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **"Evaluasi Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) Di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar"** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-UndangNomor 20 Tahun 20113, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 04 Mei 2019

Malia Diah Wijayanti
NIM. 155030107111011

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

LEMBAR PERSEMBAHAN

Yang Utama dari Segalanya…

Sembah sujud serta syukur kepada ALLAH SWT.

Taburan kasih sayangmu telah memberiku kekuatan. Atas karunia yang kau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat aku sayangi Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga malia persembhkan karya kecil ini untuk Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta cinta kasih yang diberikan tak terhingga. Semoga ini langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia. Untuk Ayah dan Ibu….Terimakasih berkat kalian aku bisa merasakan bangku perkuliahan dan terimakasih kepada almameterku tercinta Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Malia Diah Wijayanti, 2019, **Evaluasi Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) Di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar**, Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP, dan Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol. Sc, 155 Halaman. +xvi

Evaluasi Implementasi program jalan lain menuju mandiri dan sejahtera penanggulangan feminisasi kemiskinan (Jalin Matra PFK) ini adalah program yang didesain secara khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) di Provinsi Jawa Timur dimana dalam pelaksanaanya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Desa Pakisaji adalah salah satu desa yang menjadi sasaran dalam program ini dan memiliki jumlah KRTP terbanyak diantara desa lain di Kabupaten Blitar yaitu sebanyak 25 KRTP.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berlokasi di Kabupaten Blitar, sedangkan situsnya berada di Desa Pakisaji. Sumber data primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi implementasi program jalan lain menuju mandiri dan sejahtera penanggulangan feminisasi kemiskinan di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar belum berhasil dalam mencapai tujuan jika dilihat dari kriteria evaluasi kebijakan: (1) Efektifitas *(effectiveness),* Peternak dan pedagang kecil-kecilan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sangat sulit dan membutuhkan waktu jangka panjang. (2)Efisiensi *(efficiency)* Anggaran yang diberikan setiap tahunnya tetap Rp. 2.500.000, sedangkan kebutuhan KRTP setiap tahunnya meningkat. (3) Responsivitas (*responsiveness*), bantuan program jalin matra pfk belum merata kesemua KRTP yang membutuhkan di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan.(4)Ketepatan *(appropriateness),* bantuan program jalin matra tidak tepat sasaran. Sasaran yang mendapatkan bantuan ini berdasarkan Data Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2011, sedangkan program ini berjalan tahun 2017. Sehingga data tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan baik yang sudah meninggal.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

Kata Kunci : Evaluasi, kebijakan, Program Jalin Matra PFK.

SUMMARY

Malia Diah Wijayanti, 2019. **Evaluation Of Jalin Matra PFK Program in Pakisaji Kademangan Blitar Regency**. Thesis. Public Administration Department, Faculty Of Administrative Science, Brawijaya University, Advisor :Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP, 2). Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol. Sc. Page 155.

Evaluation Implementation of Jalin Matra PFK program in Pakisaji Kademangan Blitar is a program specifically designed to optimize and streamline poverty reduction programs for poor households with the Head of Female Households (KRTP) in East Java Province where they are implemented based on East Java Governor Regulation No. 14 of 2017 concerning General Guidelines for Other Roads Towards indepedent and Prosperous East Java Province in 2017. Pakisaji Village is one of the villages targeted in this program and has the highest number of KRTP among other villages in Blitar Regency, namely as many 25 KRTP.

This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach located in Blitar Regency, while the site is in Pakisaji Village. The primary data source was obtained from several interviews from related informants, while the secondary data was obtained from documents related to the research topic. His research instrument technique is the researcher himself, and several supporting tools such as interview guidelines, and other assistive tools.

The results showed that the evaluation of the Evaluation Implementation of Jalin Matra PFK program in Pakisaji Kademangan Blitar had not been successful, to achieve goals when viewed from policy evaluation criteria: (1) Effectiveness, Farmers and small traders to get bigger profits is very difficult and requires long time. (2) Efficiency (efficiency) The budget given annually remains Rp. 2,500,000, while the need for KRTP's increases every year. (3) Responsiveness (responsiveness), the assistance of the program Jalin Matra PFK has not been evenly distributed to all KRTP's in need in Pakisaji Village, Kademangan Subdistrict. (4) Accuracy (appropriateness), program assistance intertwined with the right target. The target of obtaining this assistance is based on the 2011 Integrated Database Update Data, while the program runs in 2017. So that the data is not in accordance with the reality that exists in the community of Pakisaji Village, Kademangan Sub-District, both those who have died.

Keywords: Evaluation, Policy, Jalin PFK Matra Program.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Evaluasi Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar''.**Skripsi ini merupakan Tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, M.DA. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Dr. Fadillah Amin M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP selaku Ketua Komisi Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama proses penulisan skripsi.
5. Bapak Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol.Sc selaku anggota komisi pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

6. Bapak Dr. Mohammad Rozikin, M.Si, selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen dan pegawai Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
8. Bapak Suwoyo selaku Kepala Desa Pakisaji Kecamatan Kaemangan Kabupaten Blitar .
9. Bapak Khoirul Anam, Ibu Fifa, Ibu Yumelda, selaku koordinator dan pelaksana program Jalin Matra PFK di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
10. Kedua Orang tua dan kakak yang ada di Blitar.
11. Para sahabat khususnya Erni, Jujuk, Adit, Whindy selalu mampu menciptakan canda dan tawa untuk peneliti.
12. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik khususnya angkatan 2015 yang solid, semangat, dan bersedia bertukar informasi selama masa perkuliahan.
13. Ibu-ibu desa pakisaji kecamatan kademangan yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

Malang, 04 Juli 2019

Penulis

repository.ub.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i.
MOTTO ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI iii
TANDA PENGESAHAN iv
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI v
LEMBAR PERSEMBAHAN vi
RINGKASAN vii
SUMMARY viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Kebijakan Publik 11
1. Pengertian Kebijakan Publik 10
2. Tujuan Kebijakan Publik 13
3. Proses Kebijakan Publik 13
4. Karakterisktik atau Ciri Kebijakan Publik 14
5. Tipe Kebijakan Publik 16
B. Implementasi Kebijakan Publik 17
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 17
2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik 18
3. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik 20
4. Proses Implementasi Kebijakan Publik 21

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Model Impementasi Kebijakan Publik 22
C. Kemiskinan Pedesaan 34
1. Konsep Kemiskinan 34
a. Pengertian Kemiskinan 34
b. Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan 35
c. Jenis Kemiskinan 38
2. Konsep Pedesaan 42
a. Pengertian Pedesaan 42
b. Desa dilihat dari sudut pandang Sosiologi 43
D. Evaluasi Kebijakan 45
1. Pengertian Evaluasi 45
2. Fungsi Evaluasi Kebijakan 47
3. Kriteria-kriteria Evaluasi Kebijakan 48

BAB III METODE PENELITIAN 50

A. Jenis Penelitian 50
B. Fokus Penelitian 50
C. Lokasi dan Situs Penelitian 51
D. Jenis dan Sumber Data 51
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Instrumen Penelitian 58
G. Analisis Data 60
H. Uji Keabsahan Data 62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 65
1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar 65
2. Gambaran Umum Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan 71
3. Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) ... 85
B. Penyajian Data 92
C. Analisis Data 123

BAB V PENUTUP 136

A. Kesimpulan 136
B. Saran 139

DAFTAR PUSTAKA 141

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2012-2017	1
2	Jumlah TKI lima daerah terbanyak di Indonesia tahun 2017	2
3	Jumlah KRTP menurut kelompok umur di Kabupaten Blitar Tahun 2017	3
4	Jumlah KRTP yang menrima bantuan Jalin Matra PFK di Kabupaten Blitar tahun 2017	6
5	Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2019	71
6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	81
7	Jumlah Tamatan Sekolah Desa Pakisaji	82
8	Prasarana Kesehatan di Desa Pakisaji	84
9	Mata Pencaharian dan Jumlahnya	94

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	62
2	Peta Kabupaten Blitar	65
3	Logo Kabupaten Blitar	66
4	Kantor Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	73
5	Struktur Organisasi Desa Pakisaji	76
6	Website *mothercare* Jawa Timur	114

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Surat Riset	144
2	Pedoman Wawancara	146
3	Pedoman Umum Jalin Matra PFK Tahun 2017	149
4	Dokumentasi Wawancara dengan Informaan	150

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menurut Siagian (2011:137) dipahami sebagai suatu keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari secara jasmani dan rohani. Kemiskinan di Indonesia perlu ditanggulangi, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan secara sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak mealalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Di Indonesia sendiri permasalahan kemiskinan salah satu perasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia dilihat pada tahun 2012-2017.

Tabel 1. Jumlah Penduduk miskin di Indonesia tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Presentase Penduduk Miskin (%)
Maret 2012	29,13	11,96
Maret 2013	28,07	11,37
Maret 2014	28,28	11,25
Maret 2015	28,59	11,22
Maret 2016	28,00	10,86
Maret 2017	27,77	10,64
September 2017	26,58	10,12

Sumber: BPS, data diolah Peneliti, (2018)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) diatas jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu antara tahun 2012 hingga 2017 mengalami penurunan. BPS mencatat angka kemiskinan pada tahun 2012 mencapai 29,13 juta orang dengan presentase (11,96%) dan jumlahnya terus menurun hingga Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang dengan presentase (10,64%). Sehingga, angka penurunannya sekitar 1 juta orang. Sementara, pada bulan September tahun 2017 sebesar 26,58 juta orang dengan presentase (10,12%).

Permasalahan kemiskinan secara keseluruhan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur, hal ini ditunjukan dengan tingginya angka jumlah perceraian di jawa timur pada tahun 2018 mencapai sekitar 87.475, dan penyebab tertingginya antara lain karena ketidakharmonisan rumah tangganya dan faktor ekonomi. Sehingga membuat janda-janda tersebut harus bisa mencari nafkah sendiri dan menjadi Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) untuk mencukupi keluarganya.

Tabel 2. Jumlah Kasus perceraian dari lima daerah Terbanyak
di Indonesia tahun 2018

No	Provinsi	Jumlah Perceraian
1	Jawa Timur	87.475
2	Jawa Barat	79.047
3	Jawa Tengah	69.847

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, (2018

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) daerah yang paling banyak kasus perceraianya adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah yaitu 87.475 kasus perceraian, sedangkan yang paling sedikit yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan

jumlah 69.847 kasus perceraian. Dengan tingginya kasus perceraian diatas akan membentuk sebuah lingkaran kemiskinan yang salah satunya yaitu feminisasi kemiskinan. Menurut Moghdam (2005:7) feminisasi kemiskinan adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup dibawah garis kemiskinan secara bersama. Salah satunya di Kabupaten yang mengalami peningkatan perceraian setiap tahunnya. Dimana tahun 2018 kasus perceraian hanya 1.264 perkara perceraian yang sudah terselesaikan. Sedangkan ditahun 2019 mengalami kenaikan sangat banyak yaitu mencapai 1.433 kasus perceraian. Sehingga banyak KRTP di Kabupaten Blitar.

Tabel 3. Jumlah KRTP menurut kelompok umur di Kabupaten Blitar tahun 2017

No	**Kecamatan**	**Jumlah Keluarga dengan KRTP**			
		Usia dibawah 45 tahun	Usia 45 -59 tahun	Usia 60 tahun keats	Total
1	Bakung	39	203	686	928
2	Wonotirto	54	251	926	1.231
3	Panggungrejo	66	250	848	1.164
4	Wates	51	210	629	890
5	Binangun	92	338	1.008	1.438
6	Sutojayan	86	378	927	1.391
7	Kademangan	133	546	1.558	2.237
8	Kanigoro	230	619	1.397	2.246
9	Talun	117	450	1.001	1.568
10	Selopuro	116	389	763	1.268
11	Kesamben	126	384	886	1.396
12	Selorejo	94	313	749	1.156
13	Doko	67	241	593	901
14	Wlingi	104	428	960	1.492
15	Gandusari	165	549	1.302	2.016
16	Garum	209	514	1.095	1.818
17	Nglegok	148	531	1.151	1.830
18	Sanankulon	209	488	982	1.679
19	Ponggok	283	775	1.731	2.789
20	Srengat	191	586	1.210	1.987
21	Wonodadi	143	380	819	1.342

22	Udanawu	134	344	663	1.114
Jumlah		2.857	9.167	21.887	33.911

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, (2018)

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Blitar pada tahun 2017 terdapat sebanyak 33.911 KRTP. Tingginya jumlah KRTP tersebut, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan permasalahan KRTP tingkat desa yaitu Program Jalan lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK). Secara prioritas program penanggulangan feminisasi kemiskinan tersebut dijadikan fokus utama dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Dalam pelaksanaanya program ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Umum Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Serta dalam hal tersebut diperkuat oleh Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang RPJMP 2005-2025, yang dijabarkan dalam RPJMD 2014-2019. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan anggaran yang salah satunya mengutamakan kesetaraan *gender* atau disebut juga dengan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kesetaraan *gender*.

Pentingnya peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan untuk mengurangi beban laki-laki dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluarganya. Dengan demikian, semakin besar penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gizi dan kebutuhan dasar keluarga. Dengan kata lain apabila berhasil

untuk menanggulangi kemiskinan perempuan maka akan memiliki dampak ganda yang lebih besar *(multiplier effect).*

Program Jalin Matra PFK merupakan program yang didesain secara khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifitaskan program penanggulangan kemiskinan bagi KRTP. Jalin Matra PFK bertujuan untuk memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap KRTP, memperluas akses Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan asset usaha atau pendapatan keluarga, dan membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, mendorong motivasi berusaha *(need for achievement),* dan kemampuan *(life skill)* krtp dalam rangka meningkatkan kesejahterannya. Program Jalin Matra PFK menargetkan masyarakat perempuan miskin pedesaan yang tersebar di kabupaten-kabupaten Provinsi Jawa Timur dan data informasi yang digunakan dalam Jalin Matra PFK ini adalah data makro hasil *Survey* Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) program perlindungan sosial tahun 2011 yang kemudian di vertifikasi ulang ditingkat pedesaan sebagai tempat sasaran kebijakan. Dengan demikian diharapkan dana yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut sudah tepat sasaran.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan bantuan Jalin Matra PFK. Namun, bantuan ini sifatnya bergulir sehingga pada tahun 2017 di Kabupaten Blitar yang mendapatkan bantuan program ini dari 24 Kecamatan hanya 12 Kecamatan saja yang mendapatkan bantuan Program Jalin Matra PFK.

Tabel 4 Jumlah KRTP yang menerima bantuan Jalin Matra PFK di Kabupaten Blitar tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	KRTP
1	Bakung	Plandirejo	14
2	Bakung	Tumpak Kepuh	10
3	Binangun	Binangun	13
4	Binangun	Kedungwungu	13
5	Binangun	Rejoso	16
6	Doko	Slorok	20
7	Gandusari	Tulungrejo	11
8	Kademangan	Dawuhan	16
9	Kademangan	Pakisaji	25
10	Kademangan	Panggungduwet	13
11	Kesamben	Jugo	11
12	Kesamben	Pagerwojo	11
13	Kesamben	Siraman	21
14	Ponggok	Gembongan	20
15	Ponggok	Kebonduren	15
16	Ponggok	Maliran	15
17	Ponggok	Ponggok	15
18	Selorejo	Ampelgading	11
19	Selorejo	Boro	11
20	Selorejo	Sumber agung	12
21	Sutojayan	Pandanarum	12
22	Udanawu	Bakung	18
23	Wonodadi	Kolomayan	16
24	Wonodadi	Wonodadi	20
Total			**346**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, (2017)

Berdasarkan tabel Menurut Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar yang mendapatkan bantuan Jalin Matra PFK di Kabupaten Blitar adalah Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan dengan jumlah 25 KRTP sedangkan yang paling sedikit adalah Desa Tumpak Kepuh Kecamatan Bakung dengan Jumlah 10 KRTP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka objek yang diteliti adalah Desa Pakisaji dikarenakan Desa Pakisaji terbanyak pesertanya dari 24 desa dan 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar yang menerima bantuan program tersebut.

Selain itu Desa Pakisaji cukup banyak mengalami kendala yang serius dalam pelaksanaanya yaitu, tidak tepat sasaran dan belum merata kesemua KRTP di Desa Pakisaji. Maka dari itu program Jalin Matra PFK diharapkan lebih optimal. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari program ini dapat terwujud. Penerapan program Jalin Matra PFK diharapkan merata, agar masyarakat dapat melihat bahwa program untuk KRTP itu ada dan dapat menjadi jalan keluar untuk masalah yang dihadapi. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui dan mendalami Evaluasi Implementasi program Jalin Matra PFK yang ada di Desa Pakisaji, dengan judul" **Evaluasi Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra pfk) di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan permasalahanya adalah :

1. Bagaimanakah Evaluasi Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Evaluasi Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminasasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi berkembangnya Ilmu Administrasi Publik yang mana sebagai upaya untuk memperkaya kajian kebijakan publik

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu mereferensi bagi mahasiswa atau stakeholder digunakan sebagai bahan pertimbangan serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutya khususnya penelitian terkait dengan Evaluasi implementasi program Jalin Matra PFK..

E. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat deskripsi latar belakang yang menguraikan tentang alasan penulisan skripsi terhadap evaluasi implementasi program Jalan Lain menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Rumusan masalah menerangkan masalah apa yang akan diteliti sesuai dengan judul skripsi, tujuan penelitian menerangkan tujuan yang ingin dicapai bahwa penelitian ini dapat membawa kebermanfaatan bagi siapa saja, serta sistematika penelitian yang memperlihatkan bagian-bagian apa saja yang ada di dalam penelitian skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai kerangka teori yang menghubungkan dengan evaluasi implementasi program program Jalan Lain menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra PFK) di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dengan menggunakan teori sebagai berikut : Teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan Evaluasi Kebijakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatankualitatif. Fokus penelitian terhadap evaluasi implementasi program Jalan Lain menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemisjinn (Jalin Matra PFK) di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Sumber data menggunakan sumber primer dan skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalan model interaktif Miles dan Huberman.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian, analisis data, interpretasi data mengenai analisis yang terkait dengan implememtasi program Jalin Matra penanggulangan feminasi kemiskinan, dimana hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diberikan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

David Easton (dalam Wibawa, 2011:12) mengemukakan kebijakan publik dibuat oleh lembaga atau institusi yang berwenang *(authorities)* setelah sebelumnya mereka menerima masukan/input dari masyarakat (lingkungan), sedangkan menurut Thomas R Dye (dalam Agustino,2012:7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Pendapat yang berbeda yaitu kebijakan publik adalah :

> "Serangkaian tidakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan atau (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud". (Agustino, 2012:7)

Pendapat lain dikemukakan oleh Harold D Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Islamy,2009:16) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai *"a projected program of goals, values and practices"* (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah). Kemudian Amara Raksasataya (dalam Islamy, 2009: 17-18) juga mengemukakan bahwa "kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan". Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu :

a) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

b) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan pendapat James Anderson (dalam Agustino, 2012: 7) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Sementara Easton (dalam Wahab, 2012: 13) merumuskan kebijakan publik secara singkat yaitu kebijakan publik ialah *"the relationship of governmental unit to its enviroments*''(antar hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Selain itu, pendapat tentang kebijakan publik dari Wilson yang merumuskan kebijakan publik sebagai :

> "tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)". (Wahab, 2012: 13)

Beberapa konsep yang termuat dalam kebijakan publik, menurut Young dan Quinn (dalam Soeharto, 2012:44) antara lain :

1. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata.
2. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.
3. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
4. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan publik adalah serangkaian yang perlu dan tidak perlu

dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang ada di lingkungan tertentu yang mana berbentuk kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang dalam pengimplementasian kegiatannya akan ditemui beberapa hambatan atau kesulitan-kesulitan tertentu. Program Jalin Matra PFK sendiri merupakan suatu kebijakan atau program Pemberdayaan Perempuan memberikan bantuan secara modal, bantuan modal peternakan, perancangan, pembuatan kue selama sasaran sesuai target kebijakan yang telah ditentukan dan memenuhi prasyarat yang berlaku.

2. Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2008:35) tujuan kebijakan publik dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Mendistribusi sumber daya negara kepada masyarakat, termasuk alokatif, realokatif, dan redistribusi,vesus mengabsorbsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara.
b. Regulative versus deregulatif.
c. Dinamisasi versus stabilisasi.
d. Memperkuat Negara versus memperkuat masyarakat/pasar.

3. Proses Kebijakan Publik

Wiliam Dunn (dalam Winarno, 2007:32-34) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

a) Penyusunan agenda *(agenda setting),*yakni proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
b) Formulasi kebijakan *(policy formulation),*yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
c) Pembuatan kebijakan *(decision making),*yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
d) Implementasi kebijakan *(policy implementation),*yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
e) Evaluasi kebijakan *(policy evaluation),* yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

4. Karakteristik atau Ciri Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2012: 8-9) karakteristik utama dari suatu kebijakan publik antara lain :

a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.
c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
e. Kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan suatu kegiatan yang bersifat memerintah.

Sedangkan ciri-ciri kebijakan publik menurut Wahab (2012: 20-24) menyebutkan beberapa ciri atau karakteristik kebijakan publik, antara lain:

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak *(at random)*, asal-asalan dan serba kebetulan.
b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
c. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya mengatur perdagangan, inflasi dan sebagainya.
d. Kebijakan publik membentuk positif mungkin juga negatif

Dari dua bentuk karakteristik atau ciri yang dikemukakan oleh dua ahli yang berbeda tersebut sebenarnya mempunyai persamaan makna walaupun sebagian diungkapkan dalam kata-kata atau kalimat yang berbeda, sehingga peneliti menyimpulkan beberapa karakteristik atau ciri kebijakan publik antara lain :

a. Kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang memusatkan perhatiannya pada maksud dan tujuan.
b. Kebijakan publik adalah sebuah kebijakan pemerintah yang berpola dan tidak berpisah.
c. Kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur bidang-bidang tertentu.
d. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dapat berbentuk positif dan negatif

Berdasarkan konsep diatas maka dapat ditari sebuah kesimpulan bahwa Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sehatera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) telah memenuhi karakteristik sebagai kebijakan publik. Dimana

program ini adalah suatu program dengan maksud dan tujuan memberdayakan KRTP dengan meningkatkan ekonomi krtp dan mendorong motivasi untuk berusaha berkreatifitas. Program ini juga merupakan program yang terpola dan mengarah pada tujuan tertentu. Selain itu program ini merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah yang terbentuk positif karena program ini merupakan program yang melibatkan serangkaian anggota pemerintah.

5. Tipe Kebijakan Publik

Menurut James Anderson (dalam Soenarko, 2005: 64-65) beberapa tipe kebijakan, antara lain :

a. *Substantive Policy,* yaitu kebijakan yang bersangkutan dengan yang harus oleh Pemerintah, umpamanya: mengenai pembangunan jalan raya dan jembatan, besarnya gaji pegawai negeri yang harus dibayarkan dan lain sebagainya.
b. *Procedur Policy,* yaitu kebijakan yang bersangkut paut dengan siapa dan bagaimana ijin ekspor impor

Selain itu, James juga membagi kebijakan kedalam beberapa bentuk yaitu :

a. *Distributive Policy,* yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pemberian layanan dan kemudahan kepada masyarakat dan kemudahan kepada penduduk, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, badan-badan atau golongan.
b. *Regulatory policy,* yaitu kebijakan yang mengatur perilaku dan kegiatan dalam masyarakat, baik perseorangan atau masyarakat.
c. *Self- Regulatory policy*, yaitu kebijakan yang juga mengatur, mengawasi dan membatasi perilaku dan kegiatan orang di dalam masyarakat, yang didasarkan pada *"regulatory policy".]*
d. *Redistributive policy*, kebijakan yang merupakan pembagian atau pemberian pelayanan ulang kepada penduduk, umpamanya : adanya perubahan atau pergeseran alokasi mengenai hak-hak, pendapatan, atau kekayaan dan lain sebagainya.adapun kebijakan "devaluasi uang" dan perubahan "tarif dan pajak" merupakan contoh yang baik dari kebijakaksanaan ini.

Selain itu, James juga membagi kebijakan kedalam dua kelompok, yaitu :

a. *Material policy*, adalah kebijaksanaan yang bersangkut paut dengan bahan atau barang *(tangible resource)*, kewenangan-kewenangan *(substantive power)* yang mempunyai manfaat, bagi pihak-pihak dalam masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan adanya peraturan pemerintah tentang UMR (upah minimum regional).
b. *Simbolic policy*, yaitu kebijaksanaan yang diambil namun tidak mempunyai dampak *(impact)* yang nyata ditengah masyarakat. Kebijaksanaan ini lemah berlakunya, atau oleh pengambil kebijaksanaan kurang dipertimbangkan baik-baik.

Berdasarkan konsep diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Program Jalin Matra PFK termasuk pada tipe *material policy* karena program ini berkaitan dengan kewenangan kewenangan yang mempunyai manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran program ini

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Agustino (2012: 138) mengemukakan pendapatnya tentang studi implementasi yaitu merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Pendapat lain dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabtier (dalam Agustino, 2012: 139) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah :

> "pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya

Pengertian lebih singkat juga dipertegas oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012: 139) implementasi kebijakan yaitu merupakan suatu tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Pengertian lain yang juga menekankan pada pencapaian tujuan dikemukakan Merilee S. Grindle (dalam Agustino, 2012: 139) mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Sedangkan pendapat berbeda dikemukan oleh Chief J.O (dalam Agustino, 2012:140) pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dimplementasikan.

Dengan melihat beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi kebijakan adalah suatu proses yang sangat penting dalam kebijakan publik yang berupa pengimplementasian kebijakan yang mana dalam pengimplentasiannya akan melibatkan beberapa aktor kebijakan seperti individu-individu, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Unsur-unsur implementasi kebijakan Tachjan (2006: 26-36), terdapat beberapa unsur yang harus ada, yaitu :

a. Pelaksana (Implementor)

Pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Hamdi (2014: 94) mengemukakan bahwa pembuat kebijakan adalah pemaksimal kemanfaatan serta memiliki kepentingan pribadi, yang karenanya dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan. Dalam program jalin mantra PFK ini yang menjadi pelaksana program adalah unit pengendali program jalin mantra PFK daerah yang telah ditunjuk untuk mengawasi untuk melaksanakan tugasnya agar program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan.

b. Program

Pada hakikatnya, implementasi kebijakan adalah implementasi program. Program yang akan dijalankan sebaiknya mudah dipahami isi, tujuan atau sasaran sumberdaya yang diperlukan agar para pelaksana program dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Tachjan (2006: 32-33), program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sasaran yang hendak dicapai
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.
4. Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlihan dan keterampilan yang diperlukan .

Dalam menanggulangi masalah KRTP, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan sebuah langkah melalui kebijakan program jalin mantra PFK.

c. Kelompok Sasaran *(Target Group)*

Kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Kelompok sasaran dapat mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan tergantung pada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan dari para kelompok sasaran. Dalam program jalin mantra PFK ini yang menjadi *target grup* atau kelompok sasaran adalah KRTP atau perempuan miskin. Data KRTP calon peserta jalin mantra PFK tahun 2017 dan seterusnya didasarkan pada basis data terpadu untuk program pemberdayaan perempuan yang bersumber dari pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011 yang dilaksanakan oleh BPS dan diserahterimakan kepada tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K). sasaran program jalin mantra PFK ini meliputi rumah kepala tangga perempuan miskin atau yang bercerai, suaminya sakit, dan masih produktif

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Purwanto (2012: 89-90), keberhasilan proses implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Isi Kebijakan *(the content of the policy mesage).*
   Isi kebijakan meliputi sumber daya, manfaat kebijakan, serta keterlibatan publik.
b. Format Kebijakan *(the form of the policy mesage).*
c. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan *(policy clarity),* konsistensi kebijakan *(policy concistency), frequency* serta penerimaan isi kebijakan *(receipt of message).*
d. Reputasi aktor *(the reputation of the communicators)*
e. Reputasi kebijakan terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah.

4. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Widodo (2007: 90-94) menyatakan proses implementasi suatu kebijakan publik mencakup beberapa tahap, antara lain :

a. Tahap Interprestasi *(to interpretation)*

   Tahap interprestasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknik operasional. Tidak hanya itu saja, tahap inteprestasi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan atau sosialisasi agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dana sasaran dari kebijakan yang akan dijalankan.

b. Tahap Pengorganisasian *(to organized)*

   Tahap pengorganisasian merupakan tahap dimana dilakukannya proses pembentukan pelaksana suatu kegiatan, besarnya anggaran yang dibutuhkan, sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pelaksanaan kegiatan, penetapan tata kerja (juklak atau juknis), serta penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan.

c. Tahap Aplikasi *(Application)*

   Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realita nyata. Tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan pengorganisasian yang telah direncanakan.

5. Model Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2012: 146), Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Karena disini masalah-masalah yang

kadang tidak dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.Beberapa model kebijakan yang dikembangkan oleh pakar sosial tersebut Agustino (2012: 151-154), yaitu:

a. Model George C. Edward II

   Tedapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III (dalam Agustino,2012:154) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi dapat ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomuniikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi di atas, yaitu :

a. Transmisi*;* penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan *(street-level-bureuacraft)* haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijkan yang telah ditetapkan.
c. Konsistensi*;* perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari dari beberapa elemen, yaitu :

a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat meninggalkan proses implementasi kebijakan.Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan

dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyerut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas; fasilitas yang baik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki staf yang mecukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah :

a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi

kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi *(self interest)* atau organisasi.

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya–sumberdaya menjadi tidak efektif dan

menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik sengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

b. Model Mailee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2005) yang memandang implementasi kebijakan dari sisi proses administrasi dan politik, terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan *(content of policy)* dan lingkungan kebijakan *(context of policy)*. Disebutkan oleh Subarsono (2005:65), variable-variabel yang mempengaruhi diantaranya. Variabel isi kebijakan, yang mencakup : sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Selanjutnya model Grindle ini dijelaskan lebih detail Suwitri (2008:35) tentang indikator yang terdapat pada variable-variable tersebut. Variabel isi kebijakan diperinci lagi ke dalam 6 unsur yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (*interest affected)*

Jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap berbagai macam kegiatan politik, ekonomi dan sebaginya. Dengan demikian, apabila kebijakan publik dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentinganya terancam oleh kebijakan publik tersebut.

2. Jenis manfaat yang dapat diperoleh (*type of benefits*)

   Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat banyak.

3. Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan *(extent of change envisioned)*

   Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat *(target groups)* cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya.

4. Kedudukan pengambil keputusan *(site of decision making)*

   Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya.

5. Pelaksana-pelaksana program *(program implementors)*

   Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif,

berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan sangat mendukung keberhasilan implementasi program.

6. Sumber-sumber yang dapat disediakan *(resources committed)*

   Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik.

Di samping variabel isi Kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh variabel lingkungan. Variabel ini meliputi 3 unsur, yaitu :

a. Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors involved*)

   srategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya.

b. Karakteristik rejim dan institusi *(institution and regime characteristics)*

   Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan *who gets what* atau ‘siapa mendapatkan apa.

c. Kesadaran dan sifat responsif *(compliance and responsiveness)*

   Agar tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai maka para implementor harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dari *beneficiaries*. Tanpa daya tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan

kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Model Grindle lebih melihat implementasi kebijakan dari segi implementator dan penerima kebijakan, dan melihat adanya konflik kepentingan dari antar instansi atau antara pemerintah dan masyarakat.

c. Model Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:140) disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (Sebuah Model Implementasi Kebijakan). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:141) yang mengatakan ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan kinerja

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2012:138). Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2007:99) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

b. Sumber daya

keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputiorganisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen

pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana Kebijakan.

d. Komunikasi antar organisasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo, 2007:100) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu *(implementors).* Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam *(consistency and uniformity)* dari berbagai sumber informasi.

e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino,2012:139): ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil

keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

f. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Berdasarkan konsep diatas maka dapat darik sebuah kesimpulan bahwa implementasi sangat penting. Dimana dalam pengimplemetasian melibatkan bebrapa aktor. Dimana dalam program Jalin Matra PFK ini aktor yang terlibat adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa Pakisaji, dan beberpak kelompok sasaran. Dalam pengimplemetasian juga memerlukan unsur-unsur implementasi, proses implementasi, faktor-faktor implementasi dan model implementasi publik.

C. Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi

Dunn (2003: 600) mendefiniskan evaluasi sebagai prosedur yang analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari serangkaian aksi di masa lalu dan atau di masa depan. Lebih lanjut Dunn memberi argumentasi yaitu, evaluasi memberi informasi yang valid dan

dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dapat dicapai melalui tindakan publik:

a. evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
b. evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Selain itu menurut Dunn (2003:608-609) Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai:

a. Fokus Nilai

   Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

b. Interdependensi Fakta – Nilai.

   Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada "fakta"semata namun juga terhadap "nilai". Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat; haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan

merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan *monitoring* merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.

c. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.

Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan *dating*. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan *(ex-post).* Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan *(ex-ante).*

d. Dualitas Nilai.

Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi pandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ektrinsik (diperlukan karena kesehatan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain).

Sedangkan menurut lester dan stewart (Winarno, 2012:229) evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda, pertama untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang timbul oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan yang kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standart atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa pendapat para ahli

diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang yang fungsional karena evalusi kebijakan harus dilakukan sepanjang proses kebijakan itu sendriri. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukur efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah dirasakan . Evaluasi kebijakan juga diperlukan ketika proses perumusan beberapa alternatif-alternatif kebijakan.

2. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Nugroho (2011 : 463) evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi maslah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tndakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
d. *Accounting.* Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

   Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan selalu memiliki fungsi dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang telah disampaikan diatas.

3. Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson terdapat tiga tipe evaluasi kebijakan, dimana tipe-tipe tersebut masing-masing berdasarkan pada evaluator terhadap evaluasi, tipe tersebut adalah :

a. Evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional
b. Evalusi mefokuskan diri pada bekerjanya krbijakan atau program tersebut
c. Evalusi kebijakan yang sistematis.

Ketiga tipe tersebut merupakan tipe-tipe evaluasi. Kemudian pada setiap tipe tersebut masing-masing tipe memiliki konsekuensi serta focus apa yang akan menjadi kajian evaluasi.

Selain itu pendapat lain Kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijkan berhasil atau gagal. Dunn (2003: 617) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas *(effectiveness) b*erkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2. Efisiensi *(efficiency)* berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan *(adequacy)* berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan ntara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistibusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar criteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.
5. Responsivitas *(responsiveness)* berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakn dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan ackual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan *(appropriateness)*adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas *substantive*, karena pertanyaan tentang

ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Mengutip dari Nugroho(2011:75) yang menggambarkan model implementasi dari Matland dikembangkan menjadi empat pilihan model implementasi kebijakan. Kebijakan yang bersifat kritikal bagi kehidupan bersama atau berkenaan dengan hidup-mati atau eksistensi suatu Negara, termasuk dalam hal ini pemerintahan yang sah dapat dengan dipaksakan, sehingga masuk dalam kelompok *directed.* Kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian misi Negara dirasakan untik dilaksanakan dengan pendekatan manajemen, dalam arti didelegasikan kepada berbagai aktor kelembagaan pada Negara yang bersangkuta, mulai dari lembaga Negara dan pemerintahan hingga lembaga masyarakat, baik nirlaba maupun pelaba. Kebijakan yang bersifat atau khusus, atau kebijakan yang mempunyai resiko yang tinggi jika gagal, disarankan untuk diimplementasikan dengan model *guided* dengan pendekatan *pilot project*. Kebijakan bersifat administratif. Masuk dalam kelompok ini adalah kebijakan yang berkenaan dengan pelayanan public yang mendsar. Selanjutnya yang perlu cermati adalah siapa aktor implementasi kebijakan berikut digambarkan pilihan pelaksana kebijakan.

Selain itu dalam evaluasi juga terdapat evaluasi implementasi . Seperti yang dikemukakan Nugroho (2011:706). Menurut Nugroho mengembangkan teori dari Matland pada dasarnya ada lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :

a. Implementasi efektif dalam hal kebijakan yang sudah tepat. Kebijakan ini da[pat di indikatorkan dengan sejauhmana kebijakan yang ada telah memuatkan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dicapai.
b. Implementasi yang efektif berkenaan dengan tepat pelaksanaanya
c. Tepat target
d. Tepat lingkungan
e. Tepat proses

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli peneliti lebih tertarik pada tipe evaluasi Dunn. Dunn menilai evaluasi dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas, dan ketepatan. Namun pada penelitian mengambil karakteristik evaluasi yang dianggap cocok digunakan dalam penelitian evaluasi impementasi program Jalin Matra PFK.

D. Konsep Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut Khomsan (2015:78) merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam penanggulanginya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik. Sedangkan menurut Fernandez (2002:25) kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah suatu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.

Selain itu kemiskinan menurut Suparlan (dalam Khomsan, 2015:74) dapat didefinisikan sebagai standart tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standart kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standart kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Chambers (dalam Nasikun,2001:64) mengatakan bahwa kemiskinanan adalah *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu :

1. Kemiskinan *(proverty)*
   Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep dan pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendaptan.
2. Ketidakberdayaan masyarakat *(powerless)*
   Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan akan berdampak pada kekuatan sosial dari seorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Kerentanan menghadapi situasi darurat *(state of emergency)*
   Seorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapaan untuk menyelesaikanya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehtan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relative mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.
4. Ketergantungan *(dependence)*
   Keterbatasan kemampuan ataupun kekuatan sosial dari eorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lainadalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuata untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk

mengatasi persoalan persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5. Keterasingan *(isolation)* baik secara geografis maupun sosiologis. Dimensi keterasingan yang dimaksudkan oleh chimbers adalah faktor lokal yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi terpusat pertumbuhan ekonomi seperti perkotaan besar. Mayarakat yang tinggal didaerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasil itas kesejahteraan relative memiliki taraf hidup yang rendah sehinga kondisi ini menjadikan penyebab kemiskinan.

b. **Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan**

Skema terbentuknya kemiskinan yang didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Chambers menerangkan bagaimana kondisi yang disebut miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan bahwa kemiskinan selalu diukur/diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, perumahan atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk mengkonsumsi.

Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah (Khomsan, 2015:65). Konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti:

1. Tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga berisiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap risiko penyakit menular.
2. Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas sehingga sangat rentan terhadap risiko kematian.
3. Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampak mengganggu kesehatan.
4. Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan

Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah (morbiditas) atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian (mortalitas). Angka mortalitas yang tinggi dan keadaan kesehatan masyarakat yang rendah akan berdampak pada partisipasi sosial yang rendah, ketidakhadiran yang semakin tinggi, kecerdasan yang rendah, dan keterampilan yang relatif rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing keadaan yang disebabkan oleh adanya mortalitas maupun morbiditas yang tinggi.

1. Tingkat Partisipasi Sosial Yang Rendah

   Kondisi kesehatan maupun gizi yang rendah menyebabkan ketahanan fisik atau modal fisik yang diperlukan untuk partisipasi sosial menjadi rendah. Hal ini dikarenakan kesehatan yang terganggu tidak dapat menunjang partisipasi secara penuh baik di lingkungan kemasyarakatan maupun di lingkungan kerja. Sebagian besar golongan masyarakat miskin relatif jarang terlibat secara aktif dalam aktivitas sosial.

2. Absensi Meningkat

   Faktor kualitas kesehatan yang rendah tidak mendukung adanya aspek kehadiran dalam aktivitas kemasyarakatan baik di lingkungan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Akibatnya, ketidakhadiran atau absensi dalam segala aktivitas menjadi semakin meningkat sehingga tidak memiliki kesempatan untuk berperan secara aktif dalam lingkungan sosial tersebut.

3. Tingkat Kecerdasan Yang Rendah

   Faktor gizi buruk ataupun kualitas kesehatan yang rendah akan berdampak pada menurunnya kualitas intelektual. Seperti diketahui bahwa kinerja otak manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah memerlukan gizi yang memadai atau ideal. Kekurangan gizi termasuk faktor yang paling utama terhadap adanya penurunan kualitas intelektual.

4. Keterampilan Yang Rendah

   Pada prinsipnya, keterampilan merupakan salah satu bentuk dari adanya kreativitas. Aktivitas ini harus ditunjang dengan kondisi kesehatan yang mencukupi dan tentunya adalah kualitas intelektual yang memadai.

Masyarakat yang mengalami kekurangan gizi ataupun rentan terhadap gangguan kesehatan relatif sulit untuk mengembangkan keterampilannya. Hal ini dikarenakan dukungan kesehatan untuk menjunjang pengembangan kreativitas kerja relatif rendah sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas keterampilannya.

c. **Jenis Kemiskinan**

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut kemiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidak berdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), risiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004:90):

1. Kemiskinan Absolut

   Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang,

kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikankan kriteria seorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif

   Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

   Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

   Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada

suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan Negara-negara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya (Suryawati, 2004: 88). Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Menurut Lubis (dalam Khomsan,2015:14) , yaitu :

1. Faktor alamiah
   Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.
2. Faktor non alamiah
   Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem moderenisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industry misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati, 2004: 123). Salah satu

perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai.
2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja dilingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut jugasetengah menganggur
4. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan *(slum area)*
5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Jenis kemiskinan lainya yaitu Feminisasi Kemiskinan.

1. Pengertian Feminisasi Kemiskinan

   Menurut Mooghadam (2005:7) feminisasi kemiskinan adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup dibawah garis kemiskinan secara bersama. Feminisasi kemiskinan juga mengandung arti suatu perubahan tingkat

kemiskinan yang menyerang perempuanatau Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). Chant (2006:202) menambahkan bahwa feminisasi kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kurangnya pendapatan, tetapi juga hasil dari perampasan kemampuan dan bis *gender* yang hadir dalam masyarakat dan pemerintah, serta juga akibat meningkatkan insiden "ibu" sebagai KRTP tunggal. Prioritas terhadap KRTP karena meskipun seorang laki-laki dan perempuan sama-sama miskin, kemiskinan itu disebabkan oleh alsan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, serta kemampuan yang berbeda pula dalam menghadapinya.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian, dapat digeneralisasikan bahwa kemiskinan lebih banyak diderita oleh perempuan (dalam Todaro, 2000:170). Menurut Todaro, bahwa dunia di dunia ketiga terungkap fakta bahwa kaum perempuan beserta anak-anaknya paling menderita kekurangan gizi, paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan berbagai bentuk pelayanan sosial lainya. Todaro juga mengemukakan bahwa banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, rendah kapsitas mereka mencetak pendapatan sendiri , dan terbatas control terhadap pendapatan suami. Perempuan juga memiliki keterbatasa akses dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak disektor formal, tunjangan-tunjangan sosial dan program-program penciptaan lapangan pekerjaan yang diciptakan pemerintah. Jadi semakin meningkatnya keterbelakangan perempuan bukan lantaran mereka tidak dan tidak mampu berpartisipasi dalam pembngunan, tetapi karena perlakuanya tidak adil, kerja yang mereka

lakukan tidak dianggap sebagai kerja yang mengasilkan keuntungan (Shiva, 2005:83). Pembangunan Negara berkembang sering dihubungkan dengan adanya peran ganda perempuan. Ann L.Stole dikutip dari Soetrisno (1997:72) menjelaskan bahwa pembangunan dapat mempersempit kesempatan kelompok perempuan miskin untuk melestarikan peranan ganda yang memang telah lama merupakan bagian dari kehidupan mereka. Hal ini dipertegas juga dengan melihat adanya gejala pembangunan di Negara sedang berkembang mempersempit kesemapatan peranan ganda perempuan miskin yang akan menimbulkan gejala baru di Negara-negara yang ia sebut sebagai gejala *feminization of proverty*

Berdasarkan konsep kemiskinan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu jenis kemiskinan yaitu feminisasi kemiskinan. Dimana dalam penelitian ini merupakan salah satu tema yang diangkat dalam penelitian. Menyadari dengan banyaknya KRTP miskin di Kabupaten Blitar khusunya.

2. Konsep Pedesaan

a. **Pengertian Pedesaan**

Menurut Syachbrani (2012: 15) Desa adalah Wilayah dengan jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Sedangkan menurut Sumpeno (2011:30) desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki kewenangan) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat. Bahwa kepentingan dan kebutuhan

masyarakat desa hanya dapat diketahi oleh mayarakat desa dan bukan pihak luar. Berdasrkan pengertian tentang desa dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen dan bermatapencarianya di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah sekitar. Menurut Dulay (2009:40) mengemukakan bahwa unsur-unur desa yang harus ada, yaitu :

a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat;
c. Tata Kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa *(rural society).*

Ketiga unsur ini tidak terpisah melainkan ada keterikatan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Unsur Daerah, penduduk dan tata kehidupan merupakan suatu kesatuan hidup. Maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia dan tata geografis. Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada usaha manusia untuk memanfaatkan daerahnya. Tiap-tiap daerah mempunyai geografi dan usaha manusia yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama.

b. **Desa dilihat dari sudut pandang Sosiologi**

Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam, mempunyai sifat yang sederhana dengan ikatan sosial, adat, dan tradisi yang kuat. Dari sudut pandang ini, desa mempunyai makna positif dan negatif. Makna positif yang melekat di desa antara lain seperti kebersamaan dan kejujuran. Sedangkan makna negatifnya seperti kebodohan dan keterbelakangan. Menurut Damsar (2016 : 11) dalam pengertian sosiologis desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung alam. Kemudian Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikan relatif rendah dan sebagainnya.

Secara sosiologis menurut Khomsan (dalam Damsar, 2016:12) masyarakat Desa memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya, yaitu jumlah penduduk tidak terlalu padat dan bersifat homogen, Kontrol sosial masih tinggi, sifat gotong royong masih kuat dan sifat kekeluargaannya masih ada. Boeke (dalam Damsar, 2016:17) misalnya memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri, daerah sendiri, dan

kekayaan atau pendapatan sendiri. Persekutuan hukum pribumi terkecil dapat diartikan bahwa di dalamnya tercakup pengertian :

a. Persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional;
b. Persekutuan hukum, dimana hanya penduduk pribumi atau setidak-tidaknya sebagian besar dari pada penduduk pribumi yang menjadi anggota-anggotanya.

Berdasrkan pengertian tentang desa dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen dan bermatapencarianya di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah sekitar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:2) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,2011: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilakan data deskripstif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan atau metode kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendapat data deskriptif secara jelas dan valid mengenai Evaluasi Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan(Jalin Matra PFK) di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong yang dikutip Purwanto, dkk (2012: 83) dengan bimbingan dan arahan fokus, penelitian dapat memilah-milah data mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Fokus dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana Evaluasi Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) di Desa

Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan menggunakan teori Dunn (2003: 617) , sebagai berikut :

1. Efektifitas *(effectiveness)*

   Dalam aspek efektifitas *(effectiveness)* melihat apakah alternatif atau strategi yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

2. Efisiensi *(efficiency)*

   Dalam aspek Efisiensi *(efficiency)* melihat apakah hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Artinya Berkenaan dengan jumlah yang ditinjau dari aspek anggaran, waktu pelaksanaanya hingga pelaksanaan kebijakannya.

3. Kecukupan *(adequacy)*

   Dalam aspek Kecukupan *(adequacy)* melihat dari kriteria seberapa kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Kesamaan *(equity)*

   Dalam aspek kesamaan *(equity)* apakah suatu kebijakan tersebut merata secara pendistribusian dan adil bagi semua pihak.

5. Responsivitas *(responsiveness)*

   Dalam aspek responsivitas *(responsiveness)* apakah suatu kebijakan tersebut mampu memberikan rasa puas kepada masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan seberapa jauh tanggungjawab implementor terhadap pelaksanaan kebijakan Program Jalin Matra PFK untuk KRTP mendapat respon atau tanggapan dari kelompok sasaran yang perilakunya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan Jalin Matra PFK untuk KRTP di Kabupaten Blitar.

6. Ketepatan *(appropriateness)*

   Dalam aspek ketepatan *(appropriateness)* melihat apakah kebijakan tersebut mampu serta layak dalam mencapai tujuan dan sasaran penerima dari adanya program yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan letak dimana penelitian akan melaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu di Kabupaten Blitar. Alasan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Blitar karena daerah ini memiliki cukup banyak KRTP selain itu Kabupaten Blitar juga pernah mendapatkan apresiasi untuk program pemberdayaan perempuan tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian yaitu tempat dimana peneliti dapat menangkap objek yang akan diteliti sehingga data yang diperoleh benar-benar relevan dengan demikian mengambil situs penelitian di Desa Pakisaji Kecamatan Kademamgan Kabupaten Blitar. Dasar pertimbangan pemilihan situs penelitian di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar ini karena Desa Pakisaji adalah salah satu desa yang melaksanakan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) pada tahun 2017. Desa Pakisaji mendapatkan bantuan pogram Jalin Matra PFK paling banyak dari 24 desa dengan 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar

D. Sumber Data

Menurut Moleong (2005 : 157) menjelaskan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

   Menurut Sugiyono (2013:137) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh tanpa melalui perantara yaitu menggali secara langsung dari informan atau narasumber yang diteliti berupa kata-kata atau pemaparan tindakan hasil pengamatan (observasi), antara lain:

   Catatan dari hasil wawancara dengan beberapa informan berikut:

   1) Bapak Khoirul Anam Selaku Koordinator dan Perwakilan dari Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
   2) Bapak Suwoyo Selaku Kepala Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
   3) Ibu Fifa Selaku Ketua Jalin Matra PFK dan Ketua Penggerak PKK Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
   4) Ibu Yumelda Selaku Pendamping desa untuk Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
   5) Ibu Sarmi selaku Penerima bantuan atau kelompok sasaran program Jalin Matra PFK Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
   6) Ibu Sukirah selaku Penerima bantuan atau kelompok sasaran program Jalin Matra PFK Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

7) Ibu Kasini selaku Penerima bantuan atau kelompok sasaran program Jalin Matra PFK Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
8) Ibu Siti Selaku penerima bantuan atau kelompok sasaran program Jalin Matra PFK Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

Peneliti menetapkan informan diatas karena rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dan Kepala Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan, karena yang direkomendasikan tersebut merupakan pelaksana dan yang menguasai tentang program Jalin Matra PFK ini dan berkaitan dengan judul penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013 :137) sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku-buku, dokumen resmi serta arsip-arsip yang membahas mengenai Program Jalin Matra PFK, juga laporan-laporan yang akan memperkuat data utama yang dianalisis. Data skunder dalam penelitian ini:

a. Dokumen Pedoman Jalin Matra PFK tahu 2017
b. Data jumlah KRTP pada tahun 2017
c. Data Peneriman bantuan KRTP tahun 2017
d. Informasi relevan yang terkait dengan permaslahan yang diangkat di dalam penelitian.

Menetapkan sumber data diatas karena berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian yang diangkat. Sehingga diperoleh informasi dan data secara akual pada penelitian ini. Untuk memperoleh data yang dimaksudkan maka peneliti merupakan instrument yang langsung bertatap muka untuk mendapatkan data primer maupun sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan tujuan untuk mencari data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling praktis dan strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014 : 224). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

   Menurut Sugiyono (2014 : 145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologi. Obsevarsi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. Teknik observasi yang digunakan adalah teknik observasi *non partisipan.* Menurut Moelang (2014:176) Teknik observasi *non partisipan* adalah pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Teknik ini dugunakan karena dalam proses penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan,

akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan. Pemilihan teknik jenis ini dilakukan agar peneliti dapat lebih fokus dalam melakukan terhadap objek yang diamati sehingga data observasi yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi yang sedang diamati.

2. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga bila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2014 : 137). Wawancara diarahkan pada suatu permasalahan untuk mengetahui informasi dan data sejelas mungkin yang dibutuhkan. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tannya jawab secara langsung kepada narasumber yang telah ditetapkan dengan jenis wawancara tidak terstruktur. Untuk menjaga keaslian wawancara direkam menggunakan fitur perekam suara *smartphone*, berdasar hasil rekaman wawancara ditampilkan ulang secara tertulis dan kemudian dioalag dalam bentuk data.

Pemilihan informan dari berbagai latar belakang dimaksudkan agar mendapat data dan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sudut pandang masing-masing infroman. Proses wawancara dengan narasumber menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur agar narasumber lebih luwes dan terbuka sehingga terlihat ide dan gagasan dari informan. Dalam wawancara jenis ini informan bebas menjawab baik isi maupun panjang pendek kata dari pertanyaan yang diajukan peneliti sehingga nantinya

kemungkinan besar hasil wawancara yang didapat akan memiliki hasil yang berbeda namun pada umumnya dapat dilihat pola tertentu yang sama. Dengan menggunakan teknik tersebut maka peneliti bisa mendapatkan informasi yang sangat dalam rinci.

Penulis dalam melakukan wawancara menentukan informan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar berdasarkan rekomendasi (Sugiyono, 2010:300). Sementara itu menurut Bungin(2012:53), pada prosedur sampling yang paling penting adalah menentukan informan kunci (*Key Informan)* atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip. Arsip dan termasuk buku-buku pedoman tentang masalah penelitian (Nawawi,2003 : 133). Metode pengumpulan data melalui teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan gambaran umum Desa Pakisaji, catatan yang menggambarkan pelaksanaan Program Jalin Matra PFK dan juga data-data yang mendukung. Adapun dokumen jalin matra PFK Desa Pakisaji kecamatan kademangan, yaitu:

a. Dokumen Pedoman Jalin Matra PFK tahu 2017
b. Data jumlah KRTP pada tahun 2017
c. Data Peneriman bantuan KRTP tahun 2017

d. Informasi relevan yang terkait dengan permaslahan yang diangkat di dalam penelitian.

4. Studi Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan pustaka lain yang berasal dari media cetak maupun elektronik yang sesuai dengan tema penelitian yaitu tentang Evaluasi Impelmentasi Program Jalin Matra PFK. Dalam Penelitian ini peneliti mengumpulkan data penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian melalui dokumen Pedoman Jalin Matra PFK tahun 2017, artikel atau berita yang berkaitan dengan objek penelitian program Jalin Matra PFK.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian agar memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian. Instrumen penelitian ini adalah :

1) peneliti sendiri.

Peneliti merupakan instrumen penting dalam sebuah penelitian untuk melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena yang diteliti dan mencatat hasil pengamatan tersebut. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menyiapkan pengetahuan yang cukup tentang lingkungan yang ada yaitu di Desa Pakisaji Kecamatan Kademanga dan masalah yang diangkat dalam

penelitian ini. Selain itu peneliti juga menyiapkan alat pendukung proses penelitian yang dapat mendukung dalam proses pencarian data dilapangan.

2) Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan alat yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan mewawancarai narasumber guna mendapat informasi yang relevan dan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pedoman wawancara berisi pertanyaan yang disusun oleh peneliti yang didasarkan dengan fokus penelitian yaitu tentang Evaluasi Implementasi Program Jalin Matra PFK di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Instrumen ini diperlukan agar wawancara yang dilakukan terarah dan sistematis sehingga tanya jawab yang dilakukan sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian.

3) Catatan lapangan

Catatan lapangan berisi informasi yang didapatkan oleh peneliti selama melakukan observasi dilapangan dan wawancara. Di dalam catatan ini terdapat informasi penting berupa hasil pengamatan dan hasil dari wawancara narasumber yang berkaitan dengan Evaluasi Implementasi Program Jalin Matra PFK di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Isi dari catatan-catatan tersebut digunakan peneliti untuk mengolah data penelitian.

4) Instrumen lainnya

Instrumen lain yaitu alat penunjang penelitian lain selain yang disebutkan di atas. Dalam penelitian ini alat penunjang peneliti dalam melakukan penelitian

adalah alat tulis dan *Smartphone*, alat ini digunakan peneliti untuk menulis, merekam dan mendokumentasikan penelitian yang dilakukan terkait dengan tema penelitian. Instrumen penelitian yang telah dijabarkan diatas merupakan alat bantu dalam proses melakukan penelitian. Dengan adanya instrumen penelitian kegiatan penelitian dapat berjalan dengan lancar karena instrumen pendukung penelitian guna pengumpulan data telah dipersiapkan dari awal.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Menurut pedapat mereka dalam melakukan analisis data kualitatif data yang mucul merupakan data berbentuk kata-kata yang berasal dari pengumpulan data dengan berbagai cara kemudian disusun ke dalam teks yang diperluas (Miles dan Huberman,2014:15). Untuk melakukan analisis data dengan menggunakan metode ini terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, alur kegiatan yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman (2014,16) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyajian data

   Bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar bagian demi bagian dan bukan stimulan, tersusun kurang baik dan sangat berlebihan. Untuk menghasilkan penyajian data yang baik dan valid dapat menggunakan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan guna menggabungkan informasi yang telah disusun. Sehingga nantinya memudahkan peneliti untuk

melihat fenomena yang terjadi dilapangan dan menentukan penarikan kesimpulan.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul pada catatan lapangan pada proses penelitian. Reduksi data ini dilakukan terus menerus sesudah penelitian lapangan hingga laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data berfungsi menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara melakukan seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan pada suatu pola yang lebih luas dan mengubah data menjadi angka atau peringkat tertentu yang telah ditetapkan.

3. Menarik Kesimpulan /Verifikasi

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang penting dalam analisis data. Penarikan kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-Makna yang muncul dari data yang didapat harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, dengan kata lain makna tersebut harus ditinjau ulang yang merupakan validitasnya. Kesimpulan tersebut diinterpretasikan sesuai dengan data dan kajian yang diperoleh selama proses penelitian.

Miles dan Huberman (2014:20) menggambarkan proses tersebut menjadi sebuah gambar seperti dibawah ini :

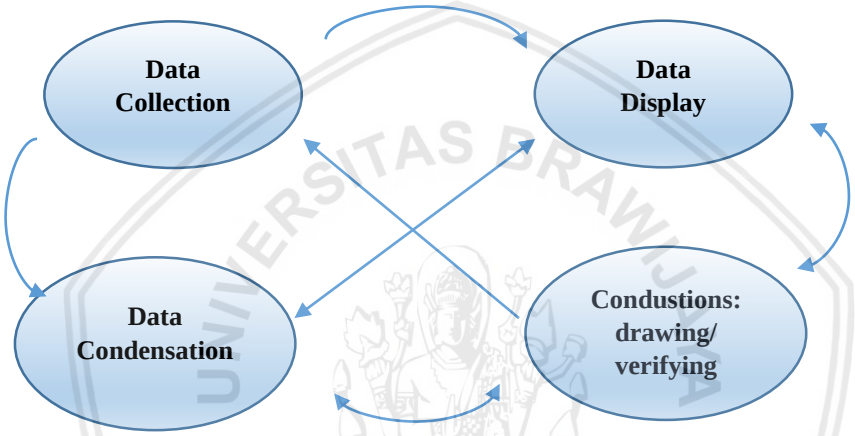

Gambar . Analisis Data model Interaktif Miles dan Huberman
Sumber **:** Miles, Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 21)

Dari gambar tersebut dapat dikatakan bahwa analisis data kualitatif dengan model analisis data model interaktif merupakan sebuah siklus yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan/verifikasi dan pemaparan dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran kegiatan yang berurutan dan kegiatan analisis yang saling menyusul serta menjadi sebuah siklus yang berulang dan berlanjut terus-menerus.

H. Uji Keabsahan Data

Kebenaran dari data hasil penelitian merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Menurut pendapat Moleong (2014:324) untuk menetapkan keabsahan data pada penelitian kualitatif diperlukan teknik pemerikasaaan data dengan

berdasar beberapa kriteria, yaitu derajat kepercayaan *(credibility),* keahlian *(transferability),* kebergantungan *(dependability),* dan kepastian *(confirmability).* Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data menggunakan teknik pemeriksanaan tingkat kepercayaan *(credibility)* atau yang sering disebut dengan kredibilitas. Kredibilitas digunakan untuk mencapai kepercayaan terhadap hasil penemuan pada penelitian dan mencapai kepercayaan untuk hasil penelitian yang memiliki kenyataan ganda yang dilakukan dengan jalan pembuktian (Moleong,2014:324). Untuk mencapai kredibilitas pada data penelitian, menggunakan beberapa teknik pemeriksaaan data:

1. Triangulasi

   Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut sebagai pembanding. Macam-macam jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

   a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali kredibilitas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dengan kata lain peneliti mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan menggunakan teknik ini maka peneliti mengetahui alasan terhadap terjadinya perbedaan-perbedaaan yang disampaikan oleh responden.
   b. Triangulasi metode, yaitu mengecek kredibilitas hasil penemuan penelitan dan kredibilitas dari beberapa sumber data. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan laporan penelitian dari seorang peneliti dengan peneliti

lainnya yang memiliki metode penelitian dan tema penelitian yang sama dengan judul penelitian ini.

c. Melakukan diskusi dengan beberapa pihak yang memiliki pengetahuan umum yang sama dengan tema penelitian yang diangkat yaitu tentang Evaluasi Impelmentasi Program Jalin Matra PFK di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar terutama mengenai isi dan metodologinya. Peneliti melakukan diskusi dengan kedua dosen pembimbing dan teman sejawat yang paham dengan Program Jalin Matra PFK.

Uji keabsahan data ini dilakukan agar dalam menyajikan data lebih terukur reliabilitasnya dan memberikan kesempatan untuk menguji persepsi dari peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar

c. Profil Kabupaten Blitar

Gambar 2. Peta Kecamatan Kademangan
Sumber : *Website* Pemerintah Kabupaten Blitar,(2019).

Kabupaten Blitar adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blitar merupakan Kabupaten dengan luas wilayah 1.588,79 km² dan jumlah penduduk berdasarkan Data Pusat Statistik sebanyak 1.268.194 jiwa pada tahun 2017 yang tersebar di 22 Kecamatan, 220 Desa, dan 28 Kelurahan. Kabupaten Blitar juga dikenal sebagai daerah dengan potensi yang beragam, diantaranya potensi dari pertanian, perkebunan,

industri,peternakan, tanaman obat herbal, dan lain sebagainya (*Website* Pemerintah Kabupaten Blitar, 2019).

Gambar 3. Logo Kabupaten Blitar

Sumber : *Website* Pemerintah Kabupaten Blitar, (2019)

Logo Kabupaten Blitar memiliki arti yang dilihat dari lambing-lambang yang melekat dalam logo tersebut, antara lain : Bentuk seluruhnya merupakan segi lima: Lambang Pancasila.

1. Candi penataran : Peninggalan Majapahit sebagai lambang kebudayaan yang luhur.
2. Keris Pusaka : Lambang semangat dan jiwa kepahlawanan rakyat Blitar, sejak masa dahulu hingga sekarang.
3. Sungai brantas dengan warna biru diatas dasar warna hijau dan kuning: Lambang kemakmuran, membagi daerah Blitar, menjadi 2 bagian, yang sebelah utara sungai daerah makmur dan sebelah selatan daerah kurang makmur.

4. Pangkal keris dengan bentuk gunung dengan api yang menyalanyala: Lambang kedinamisan rakyat Blitar yang tak putus asa, dan patah semangat, malahan semakin membaja, pantang mundur dalam berjuang dalam menghadapi malapetaka.
5. Pohon beringin : Lambang pengayoman pemerintahan yang diharapharapkan oleh rakyat demi keadilan
6. Segi 5(lima) ditengah warna biru muda : Lambang kegotongroyongan dalam suasana aman dan damai
7. Padi kapas : Lambang sandang dan pangan kemakmuran buah kapas = 8 dan butir padi = 17 mengingatkan kita kepada cita-cita revolosi 17 – 8 – 45.
8. Pita dwiwarna dengan bintang emas bersudut lima diatas dasar : Lambang jiwa kepemimpinan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Website* Pemerintah Kabupaten Blitar, 2019)

d. Sejarah Kabupaten Blitar

Penentuan titi mangsa lahirnya Blitar sebagai pusat pemerintahan merupakan jawaban atas masalah hari pendirian Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi Kabupaten Blitar. Dari berbagi prasasti yang dipandang sebagai bukti autentik seperti terurai atas, tidak terdapat sebuahpun yang memuat nama Blitar sebagai nama tempat Pusat Pemerintahan. Suatu hal yang pasti bahwa beberapa nama desa atau tempat yang disebutkan dalam prasasti-prasasti itu berada atau termasuk wilayah Kabupaten Blitar sekarang. Kenyataan itu membuktikan bahwa sebagian daerah Blitar sejak sepuluh abad yang lalu telah menjadi pusat kehidupan masyarakat yang penting. Berita yang pasti mengenai pertumbuhan Blitar sebagai

Pusat Pemerintahan mulai ada sejak awal pemerintahan Raja-raja Majapahit. Sebagimana dapat dibuktikan dalam sejarah Kerajaan Majapahit lahir setelah Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Tartar Ku Bilai Khan pada Tahun 1293 M.

Majapahit sebagai negara baru berpusat di dekat Mojokerta. Di bawah pimpinan raden Wijaya sebagai Raja pertama, negara Majapahit tumbuh dengan pesat. Suatu hal yang menarik dalam hubungan sejarah daerah Blitar dari masa itu ialah adanya peningalan bangunan suci yang terletak di Desa Kotes Kecamatan Gandusari. Pada bangunan itu terdapat angka Tahun 1222 Saka dan 1223 Saka. Dengan demikian bangunan tersebut berasal dari tahun 1300 dan 1301 Masehi. Dengan perkataan lain, bangunan itu adalah sejaman dengan Pemerintah Raja Pertama Majapahit. Kenyataan di atas membuktikan bahwa sejarah Blitar pada awal abab ke – XIV masih menunjukkan wilayah yang penting.

Suatu petunjuk yang dapat memberikan keterangan tentang hal itu antara lain terdapat sejumlah Prasatti dari masa abad ke – XII Masehi di daerah sepanjang lembah Gunung Kawi sebelah Barat. Ini menunjukkan bahwa daerah ini masih dapat dibuktikan hingga sekarang dengan adannya beberapa perkebunan. Faktor alamiah yang menguntungkan ini menyebabkan adannya kehidupan masyarakat yang makmur. Kemakmuran itu mendorong pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu singkat. Walaupun tidak terdapat catatan tentang jumlah penduduk di daerah bagian Timur ini, namun dapat diperkirakan bahwa dengan adanya men-power maka daerah ini menjadi penting. Tersedianya tenaga manusia yang cukup besar, merupakan salah satu jaminan pergerakan pasukan secara mudah untuk

suatu tujuan pertahanan maupun serangan. Seperti halnya dalam prasati Tuhanyaru yang menyebutkan adanya anugrah tanah kepada sejumlah pejabat kerajaan berhubung yang bersangkutan telah berjasa kepada raja, maka prasasti Blitar pun memuat peryataan yang sama. Dapat diketahui bahwa hubungan antara raja Jayanegara dengan daerah Blitar mempunyai sifat yang istimewa. Hubungan yang istimewa itu diperlihatkan pada penempatan sejumlah ha yang diberikan kepada para pejabat, berhubungan dengan kesetiyaan desa Blitar kepada raja. Dalam hubungan ini peristiwa apakah yang terjadi sehingga raja berkenan untuk memberikan anugrah kepada penduduk desa Blitar.

Seperti diketahui Raja Jayanegara menjadi raja majapahit yang kedua, mengantikan ayahnya Kerjarajasa Jayawardhana yang meninggal pada tahun 1309 M. Tentang Pemerintahannya ini ada dua sumber yang memberikan keterangan agak berbeda. Kedua sumber tadi adalah Negara kertagama, yang ditulis oleh Prapanca dan Pararaton yang tidak dicantumkan nama penulisnya. Secara singkat sekali Negara kertagama menceritakan tentang masa Pemerintahannya yang berlangsung antara tahun 1309-1328 Masehi, yaitu : Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran :

1) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan ;

2) Meningkatkan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai ;
3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi ;
4) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ;
5) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. (*Website* Pemerintah Kabupaten Blitar)

e. Penduduk

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakan pembangunan, namun apabila kualitas sumber daya manusia masih rendah akan menghambat dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak dengan kualitas SDM tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Adapun Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar untuk masing-masing Kecamatan, yaitu :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar 2019		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bakung	15.090	15.388	30.475
2	Wonotirto	20.701	20.778	41.479
3	Wates	16.949	23.360	45.096
4	Binangun	24.433	17.147	34.188
5	Sutojayan	26.277	24.755	49.520
6	Kademangan	36.328	26.293	52.191
7	Kanigoro	38.625	35.863	72.829
8	Talun	33,073	39.204	77.370
9	Selopuro	22.828	33.297	66.125
10	Kesamben	29.347	29.629	46.971
11	Selorejo	21.621	22.880	43.311
12	Doko	22.729	29.657	45.609
13	Wlingi	29.484	38.062	58.971
14	Panggungrejo	37.957	33.387	59.141
15	Sanankulon	34.427	38.388	76.019
16	Ponggok	39.114	28.891	68.300
17	Srengat	28.597	52.590	76.702
18	Wonodadi	51.493	26.219	57.458
20	Garum	33.164	22.284	104.083
21	Gandusari	25.255	51..474	66.779
22	Nglegok	21.719	22.284	51.474
Jumlah		630.755	637.419	1.268.194

Sumber : *Website* Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, (2019)

B. Gambaran Umum Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

a. Profil Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

Pakisaji adalah Desa yang berada di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Jawa Timur. Desa Pakisaji memiliki luas wilayah sebesar 646.550 km^2 dan jumlah penduduk berdasarkan data monografi desa pakisaji 2334 jiwa pada tahun 2019. Desa Pakisaji juga dikenal sebagai daerah dengan potensi yang beragam, diantaranya pertanian, peternakan, pertambangan, industri, dll.

Suhu rata-rata harian di desa ini adalah 28 derajat celcius. Secara geografis Desa Pakisaji terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 274 m di atas permukaan air laut. Secara administratif, Desa Pakisaji terletak di Wilayah Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan posisi dibatasi oleh desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Maron Kecamatan Kademangan. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Pulerejo Kecamatan Bakung, sedangkan disisi timur berbatasan dengan Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan. Jarak tempuh Desa Pakisaji ke ibukota kecamatan adalah 9 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 20 menit sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 25 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit.

Gambar 2. Kantor Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

Sumber : Dokumentasi Penulis, (2019).

b. Sejarah Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

Saat terjadinya perang saudara di Mataram, anak silir yang bernama Jayakrono lari ke Arah Timur dengan 3 punggawa yang bernama Suroyadi, Surogenthuk, dan Surosentono. Setelah datang di Kutuk, ketiga punggawa diperintahkan untuk membabat alas Kutuk untuk peristirahatan lalu alas setelah dibabat dinamai desa Demok atau Padepokan Demok. Untuk melibatkan jajahan atau babat desa itu, Sentono diperintahkan ke arah Selatan, Surodanu diperintahkan ke arah Barat, dan Suroyadi diperintahkan ke arah Timur.

Saat arah waktu ditentukan oleh terbitnya dan tenggelamnya matahari. Pada waktu tenggelamnya matahari, Suroyadi ke arah Timur dan membabat alas bersama punggawanya menjadi wilayah yang dinamai desa Tayaman karena tumbuh pohon Tayaman. Desa Tayaman dipimpin oleh Ki Suroyadi bersama sekretarisnya Saji. Setiap ke Onderan Belanda, Suroyadi menugaskan Saji. Pihak Belanda memanggil Ki Saji dengan panggilan Pakki Saji karena tidak mengetahui bahwa kata Ki mempunyai arti yang sama dengan Pak atau Bapak. Dan di daerah Tayaman juga tersohor pohon Pakis. Sehingga desa Tayaman berubah nama menjadi desa Pakisaji. Pohon pakis ini menjadi lambang desa Pakisaji. Perubahan nama desa juga berakibat pada pemindahan ibukota di Jalan Tumpak Sablah No. 28 dengan nomor kode pos 66161 yang saat ini merupakan balai desa Pakisaji. Kelanjutan dari punggawa Sentono

yang diperitahkan ke arah Selatan dan membabat alas yang terdapat tanaman Bucang dan Laban sehingga wilayah tersebut saat ini dinamai kecamatan Bucanglaban. Punggawa Surodano pada malam hari berhenti di depan tepi sungai namun sungai banjr dan jebol dan saat ini wilayah tersebut benama desa Kali Dawir.

Pada tahun 1968 terjadi peristiwa PKI, desa Pakisaji menjadi desa karantina dikuasai oleh pihak ABRI. Peistiwa ini berdampak pada pemerintahan desa. Sejak tahun 1969 sampai dengan 1998 dikepalai oleh ABRI, antara lain pada periode 1968-1974 dikepalai Ki Prayogo,periode 1974-1979 dikepalai Ki Ramelan, periode 1979-1984 dikepalai Ngatemin dan periode 1984-1998 dikepalai Ki Ngadiman. Dan untuk periode selanjutnya kepala desa/lurah dipilih melalui pemilihan. Sehingga terpilih Ki Lamidu menjadi PJ (Pejabat) namun tidak mempunyai wewenang pada periode tahun 1998 sampai dengan 2003. Selanjutnya pemerintahan pada periode tahun 2003 sampai dengan 2013 dipimpin oleh Ki Heru Sukoyo. Saat ini desa Pakisaji dipimpin oleh Ki Suwoyo mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2019 selama 6 (enam) tahun.

c. Visi Misi Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan

Visi desa Pakisaji adalah “Terwujudnya Masyarakat Desa Pakisaji yang sejahtera dan mandiri terdepan di segala bidang ekonomi” Untuk meraih visi Desa Pakisaji seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Maron sebaga berikut :

a) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa.
b) Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
c) Meningkatkan peran lembaga keuangan desa dalam pengelolaan asset desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
d) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal sehingga mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur (wirausaha) untuk mewujudkan kemandrian.
e) Meningkatkan peran posyandu dan kader dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
f) Membangun dan mendorong tumbuhnya usaha ekonomi produktif melalui pokmas dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
g) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan, pengairan, perbaikan jalan sawah/ jala usaha tani , pemupukan, dan pola tanam yang baik dengan mengoptimalkan peran kelompok tani dan HIPPA untuk mefasilitasi kebutuhan petani.
h) Meningkatkan peran lembaga-lembaga desa dan kader pemberdayaan untuk mewujudkan semangat kegotong royongan masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan.
i) Melestarikan lingkungan hidup dengan memanfaatkan lahan dengan produktif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

d. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

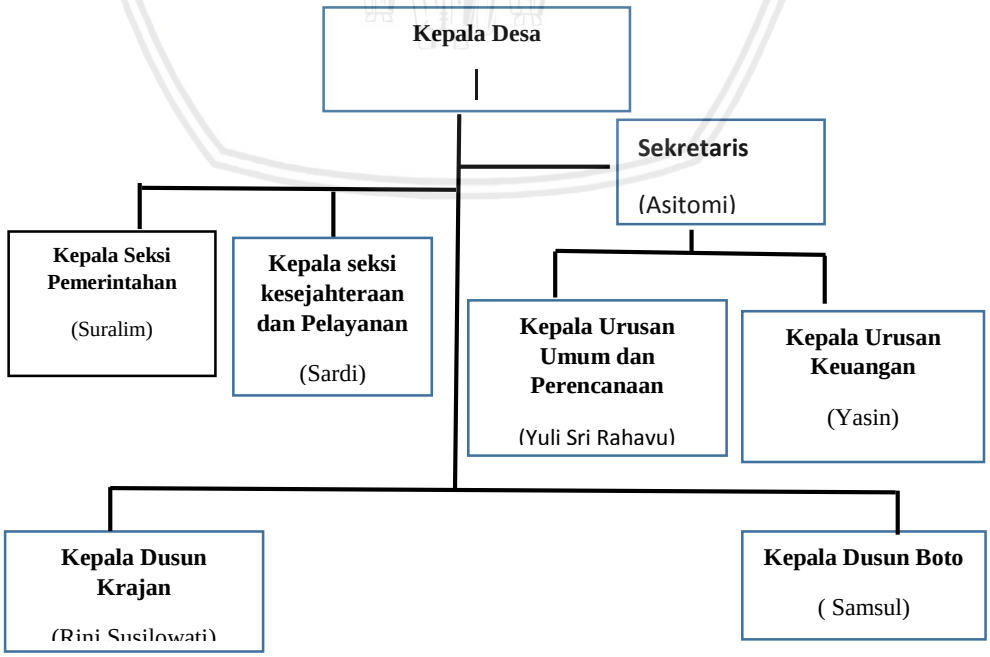

Gambar 6. Struktur Organisasi Desa Pakisaji

Sumber: Desa Pakisaji Kecamtan Kademangan Kabupaten Blitar,(2019).

Susunan Organisasi Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar terdiri dari:

1) Kepala Desa
2) Sekertaris
3) Kepala seksi Pemerintahan
4) Kepala seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
5) Kepala urusan umum dan perencanaan
6) Kepala Urusan Keuanagan
7) Kepala Dusun Kerajan

e. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Desa

   Kepala desa bertugas sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan desa , melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala desa memiliki fungsi, sebagai berikut: Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan mayarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan , kesehatan. Pembangunan masyarakat seperti hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya , dan keagamaan.

2. Sekretris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrsi pemerintah. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris desa mempunyai tugas poko, yaitu :

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, investasi dan perjalanan dinas.
c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, vertifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainya
d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja desa

3. Kepala seksi pemerintahan

Kepala seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.Untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya

perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

4. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

   Kepala seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

   Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Urusan umum dan perencanaan mempunyai fungsi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

6. Kepala Urusan Keuangan

   Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

7. Kepala Dusun

   a) Kepala kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dusun atau sebutan lain memiliki fungsi: a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

   b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;dan

d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

f. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Pakisaji adalah terdiri adalah 791 Kartu Keluarga (KK), dengan jumlah total 2.334 jiwa dengan rincian 1.171 laki-laki dan 1.163 perempuan sebagaimana terlampir :

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
.	0-4	49	52	101
2.	5-9	53	45	98
3.	10-14	61	65	126
4.	15-19	73	86	159
5.	20-24	82	73	155
6.	25-29	78	84	162
7.	30-34	51	74	125
8.	35-39	86	82	168
9.	40-44	85	92	177
10.	45-49	92	90	182
11.	50-54	88	70	158
12.	55-58	53	45	98
13.	>59	320	305	625

Jumlah Total	1.171	1.163	2.334

Sumber : Data Monografi Desa Pakisaji, (2018).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Pakisaji didominasi dengan jumlah penduduk non produktif yaitu usia lebih dari 59 tahun. Tingkat kemiskinan di Desa Pakisaji termasuk tinggi. Dari jumlah keseluruhan KK yaitu 785 KK, sejumlah 447 tercatat sebagai Pra Sejahtera, 148 KK tercatat sebagai KK Sejahtera 281 tercatat sebagai KK Sejahtera II, 219 KK tercatat sebagai KK Sejahtera III, dan 121 KK tercatat sebagai KK Sejahtera plus. Jika golongan KK Sejahtera dan KK golongan I digolongkan golongan miskin maka sekitar 60,66 % KK Desa Pakisaji adalah Keluarga Miskin.

g. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam menunjukkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Data tamatan sekolah Desa Pakisaji dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7. JumlahTamatan Sekolah Masyarakat Desa Pakisaji

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta huruf usia 10 Tahu keatas	304
2	Usia Pra Sekolah	321

3	Tidak Tamat SD	784
4	Tamatan Sekolah SD	1319
5	Tamatan Sekolah SMP	900
6	Tamatan Sekolah SMA	554
7	Tamatan Sekolah PT/ Akademik	42

Sumber : Data Monografi Desa Pakisaji, (2018)

a. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat ke depan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernafasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktivitas masyarakat Desa Pakisaji secara umum.

Data orang cacat mental dan fisik juga cukup tinggi jumlahnya. Tercatat penderita cacat fisik dan mental berjumlah 16 orang, tuna wicara 2 orang, tuna netra 2 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di

Desa Pakisaji. Hal yang perlu dipaparkan adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam Keluarga Berencana (KB). Peserta KB di Desa Pakisaji sangat aktif sehingga program 2 anak cukup berhasil, sedangkan jumlah bayi yang diimuniasasikan dengan Polio dan DPT-1 sangat penting hal ini membuktikan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas dan Polindes di Desa Pakisaji maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif lengkap ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir.

Hal yang perlu juga dipaparkan adalah kualitas balita, dalam hal ini dari sekian banyak balita masih terdapat balita bergizi buruk dan lainnya sedang dan baik. Hal inilah yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Pakisaji ke depan lebih baik. Adapun prasarana kesehatan Desa Pakisaji adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Prasarana Kesehatan di Desa Pakisaji

No	Nama Prasarana	Jumlah
1	Posyandu Lansia	6
2	Posyandu Balita	6
3	Poskedes	1
4	Pustu	1
Jumlah total		14

Sumber : Data Monografi Desa Pakisaji, (2018).

h. Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Pakisaji adalah Rp700.000,- / bulan. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pakisaji dapat diidentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa atau perdagangan berjualan, industri dan lain-lain. Adapun data mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 9. Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	1.916
2.	Jasa 1. Pemerintahan 2. Perdagangan 3. Angkutan 4. Keterampilan 5. Lainnya	 108 293 91 148 242
3.	Sektor Industri	167
4.	Sektor lain	384
Jumlah Total		2334

Sumber : Data Monografi Desa Pakisaji, (2018).

C. Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminasasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK)

Jalin Matra PFK merupakan program yang didesain secara khusus dan inklusif untuk KRTP miskin. Proses pelaksanaan program tersebut melalui beberapa tahap, yaitu :

a) Sosialisasi

Sosialisasi Jalin Matra PFK bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan Jalin Matra PFK.Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang oleh sekertariatan program jalin matra tingkat Provinsi

dan Kabupaten. Agenda sosialisasi terdiri atas penjelasan umum Jalin Matra PFK sampai dengan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan PFK.

b) Pra Rembug warga

Pra rembug warga merupakan pertemuan khusus yang diadakan sebelum rembug warga, bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan rembug warga, dengan agenda : pembentukan dan penetapan secretariat desa dan pendamping desa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah Desa, difasilitasi oleh pendamping kabupaten dan Tim Fasilitas Kecamatan. Pembentukan dan penetapan Sekreariat desa Penjaringan dan Penetapan Pendamping Desa

c) Rembug Warga

1) Sekretariat desa melaksanakan rembug warga dan difasilitasi oleh Tim Fasilitas Kecamatan dan Tenaga Pendamping Kabupaten
2) Rembug warga bertujuan sebagai media sosialisasi PFK ditingkat Desa Kepada stakeholder Desa.
3) Rembug warga di desa diikuti unsur : Sekretariat Desa, BPD, Kasun lokasi KRTP, Perwakilan KRTP, Tokoh masyarakat, Pendamping Desa dan bila perlu dapat mengundang perwakilan RT/RW lokasi KRTP.
4) Agenda rembug warga meliputi: Sosialisasi Jalin Matra PFK, Vertifikasi penerima bantuan, memastikan bahwa bantuan keuangan khusus PFK telah dianggarkan dalam APBDesa.
5) Kegiatan Vertifikasi dilaksanakan untuk mendapatkan data KRTP yang aktual dan faktual.

d) Vertifikasi data

Vertifikasi data dilaksanakan dengan menggunakan prinsip partisipatoris delibratif, yaitu musyawarah Warga terbatas (Rembug warga), ketentuan Vertifikasi sebagai berikut :

1) Memastikan calon sasaran KRTP dari data PBDT tahun 2015, memenuhi kriteria sebagai RTS program PFK.
2) Kriteria KRTP yang layak untuk menerima bantuan antara lain, telah bercerai, suami meninggal , ditinggal suami dalam waktu lama dan tidak mendapatkan nafkah (ditelantarkan), memiliki suami yang defabel dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif, serta KRTP sebatang kara usia produktif dan mampu mengelola usaha
3) KRTP dinilai tidak layak menjadi sasaran apabila factual dalam kondisi antara lain : KRTP dimaksud telah menikah lagi, meninggal dunia / pindah dan sudah tidak ada ART yang memenuhi kualifikasi, berdasarkan hasil rembug warga terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik, menolak bantuan.
4) Apabila ditemukan calon KRTP yang sudah tidak memenuhi kriteria, maka dilakukan pergantian dengan usulan rembug warga
5) Hasil vertifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil rembug warga.

e) Klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP

Klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP dilakukan dengan berdialog dan berinteraksi langsung dengan KRTP sasaran untuk mengecek kondisi rill / factual KRTP serta mendalami jenis kebutuhan KRTP yang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik social ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran. Klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan dilaksanakan oleh pendamping desa difasilitasi secretariat desa dan pendamping kabupaten menggunakan from instrumen klarifikasi dan identifikasi kebutuhan. Hasil kegiatan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan selanjutnya disampaikan dalam forum rapat pengelola desa, serta ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa tentang penerima bantuan penanggulangan feminisasi, jenis kelamin, dan rencana usaha.

f) Pengajuan pencairan dana dan bantuan keuangan khusus

1) Pengajuan pencairan BKK Pemerintah Kabupaten pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang disampaikan kepada gubernur jawa timur nelalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi jawa timur. Dokumen pencairan dana BKK kepada pemerintah kabupaten (dibuat rangkap 2) berupa: surat permohonan BKK dari bupat, kwitansi sesuai dengan jumlah bantuan keuangan khusus, fotocopy DPA dan fotocopy rekening kas daerah.

2) Pengajuan pencairan BKK Pemerintah Desa Rembug Kelompok Masyarakat (POKMAS)

g) Rembug kelompok atau Pokmas

Kelompok masyarakat adalah sekumpulan KRTP yang secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal social dibentuk dengan memperhatikan kedekatan tempat tiinggal. Pokmas berfungsi sebagai lembaga *channeling* dalam rangka mengefektifkan bimbingan usaha dan pengembangan jejaring. Pembentukan Pokmas KRTP difasilitasi oleh pendamping desa. Pembentukan pokmas dilakukan secara sukarela dan sesuai kearifan sosio kultural berdasarkan kesamaan jenis usaha dan atau kedekatan rumah tinggal. Pembentukan pokmas dilakukan melalui pertemuan rumah tangga sasaran dengan agenda menyepakati nama-nama anggota dan nama kelompok.

h) Pengadaan Barang KRTP

1) Pengadaan barang untuk kebutuhan KRTP sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan KRTP.
2) Pengadaan barang untuk kebutuhan KRTP dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel, serta disesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat.
3) Pengadaan barang dilakukan pemerintah desa melalui TPK yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

i) Penyerahan Barang Bantuan Kepada KRTP

1) Sekrtariat desa bersama pendamping desa melakukan

penyerahan bantuan barang kepada KRTP

2) Penyerahan bantuan barang dilaksanakan dalam rembug pokmas KRTP yang dihadiri oleh KRTP secara langsung
3) Pemberian informasi tentang bantuan yang akan diberikan kepada KRTP, pemberian arahan, motivasi dan atau bimbingan teknis tentang pengelolaan usaha KRTP dan penyerahan Bantuan.
4) Penyerahan bantuan pada setiap KRTP di dokumentasikan satu persatu disertai bukti tanda terima.

j) Bimbingan Teknis

Bimbingna teknis dimakstkan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitas teknis kepada KRTP penerima bantuan agar dapat memanfaatkaan dan mengembangkan bantuan usaha yang diberkan, sehingga memberikan manfaat optimis secara ekonomi

1) Bimbingan teknis bisa berbentuk pembinaan usaha, peningkatan SDM, manajemen, teknologi, akses kebutuhan. Bnatuan teknis dapat pula berbentuk resolusi konflik, yakni penanganna terhadap permasalahan yang terjadi.
2) Pelaksanaan bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh sekretariatan provinsi, kabupaten, Desa, Organisasi perangkat daerah terkait, dan atau stakeholder dengan dibantu pendamping kabupaten. Sasaran bimbingan teknis adalah KRTP, pendamping Desa atau stakeholder tingakat desa.

k) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui rembug warga yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pada masing-masing lokasi sasaran. Pegelolaan dan pelestarian program Pengelolaaan dan pelaksanaan program jalin matra PFK sebagai berikut:

1) Usaha produktif dikelola secara mandiri oleh rumah tangga sasaran dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2) Sekretariat desa dan pendamping desa memantau perkembangan usaha produktif KRTP. Untuk usaha yang berkembang dapat Usaha produktif dikelola secara mandiri oleh rumah tangga sasaran dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3) Sekretariat desa dan pendamping desa memantau perkembangan usaha produktif KRTP. Untuk usaha yang berkembang dapat ddi fasilitasi untuk mendapatkan fasilitasi prmbiayaan atau pemodalan melalui lembaga keuangan mikro ditingkat desa.
4) Pelestarian jalin matra PFK dikoordinasi oleh secretariat desa dalam bentuk bimbingan teknis dan pendampingan terhadap KRTP dan atau Pokmas KRTP secara berkelanjutan.
5) Pemerintah kabupaten diharapkan mengembangkan prakarsa kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan jalin matra PFK di masing-masing Kabupaten.
6) Keberlanjutan (*Sustainabillity)* Jalin Matra PFK, dilaksanakan melalui fasilitas pengembangan usaha produktif KRTP dan atau pokmas KRTP, Fasilitasi pungutan modal sosiall KRTP melalui penguatan

kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris, dan pengembangan jejaring usaha, baik disektor hulu, hilir, maupun fasilitasi permodalan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia KRTP.

D. Penyajian Data

1. Evaluasi Implementasi Program Jalin Matra Penangggulangan Feminasi Kemisinan (Jalin Matra PFK)

Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dilatar belakangi karena adanya amanat Peraturan Gubernur No 14 tahun 2017 tentang pedoman umum Jalin Matra PFK tahun 2017. Bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di jawa timur. Tidak terkecuali untuk KRTP yang tujuanyan adalah untuk memberikan akses krtp melalui optimalisasi peran kader TP-PKK sebagai *mothercare* KRTP untuk memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan krtp terhadap usaha produktif untuk peningkatan asset atau usaha pendapatan keluarga, membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi krtp untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, mendorong motivasi berusaha dan kemampuan KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahterannya.

Untuk mengukur tujuan Jalin Matra PFK, maka menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn(2003:617), keenam kriteria tersebut akan diulas satu per satu untuk menjabarkan evaluasi

program Jalin Matra PFK yang diberikan untuk KRTP yang ada di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan. Beberapa kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh Wiliam dunn, adalah enam kriteria yang mampu menggambarkan sejauh mana tujuan dari pada kebijakan ini terwujud di lokasi penelitian. Keenam kriteria beserta ulasanya antara lain :

a. Efektifitas *(effectiveness)*

Efektifitas *(effectiveness)* berkenaan dengan apakah suatu alternatif yang dipilih untuk mencapai hasil yang diharapkan mampu mencapai tujuan dari program jalin Matra PFK yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya alternatif kebijakan yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan inklusif di lokasi penelitian mampu mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketercapaian program Jalin Matra PFK untuk KRTP di desa Pakisaji Kecamatan Kademangan secara umum belum bisa memenuhi empat tujuan ini. Dengan adanya program ini KRTP sudah bisa mengembangkan progrm tersebut oleh kelompok sasaran. Namun dalam pelaksananaanya, masih terdapat satu tujuan yang belum tercapai yaitu tentang perluasan akses rumah tangga sasaran dengan kepala rumah tangga perempuan terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha / pendapatan keluarga. Dimana untuk mendapat keuntungan yang lebih besar itu sangat lambat karena bantuan peternkan tidak bisa diandalkan setiap harinya. Berkaitan dengan ini Kepala Desa Pakisaji Bapak Suwoyo juga mengatakan :

> "Mengenai keefektifan atau sejauh mana program ini mencapai tujuannya saya tidak faham. Karena tugas kami bukan pada sisi itu.

> Tugas dan tanggungjawab kami adalah hanya sebagai pendampingan sosialisasi dan operator yang menerima Anggaran dari Pemerintah kabupaten blitar yang kemudian dialokasikan untuk biaya Jalin Matra PFK bagi kelompok sasaran yang sudah terdaftar di desa Pakisaji Kecamatan Kademangan". (wawancara tanggal 04 April 2019 pukul 08.00 WIB di Kantor Desa Pakisaji).

Dari Penjelasan Bapak Suwoyo selaku Kepala Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan beliau tidak mengetahui trentang pelaksanaan program Jalin Matra PFK dilapangan karena tugas beliau hanya mendampingi sosialisasi, mengawasi dan tanggungjawab terhadap anggaran yang sudah turun dari Kabupaten Blitar untuk kelompok sasaran penerima bantuan Jalin Matra PFK. Selain itu Bapak Koirul Anam selaku Koordinator dari DPMD Kabupaten Blitar juga mengatakan :

> "Jadi gini kalo Program Jalin Matra PFK itu salah satu memang tujuan utamanaya adalah memebantu peningkatan ekonomi khususnya KRTP, kalo target secara pelaksanaan alhamdulilah di kabupaten Blitar sudah terlaksana dengan baik artinya semua KRTP yang kemudian berbasis data PPLS 2011 sudah tervertifikasi ditingkat desa sudah menerima semua sesuai dengan kebutuhan. Maksutnya kebutuhan modal usaha yang disesuaikan dengan ketrampilan dan juga kemauan yang bersangkutan itu prinsip utama sudah terlaksana dengan baik. Selain itu kita sebagai pelaksana terus memberikan dorongan kepada KRTP supaya KRTP tersebut semangat dan bisa mengembangkan usahanya dengn baik. Sedangkan kendala yang menghambat berjalanya program jalin matra pfk ini yaitu, Bagaiamana kita dapat menggali usaha yang kemudian prospektif yang artinya untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar itu susah kalo didarah pedesaan, dari program kita mendorong *retail* yang keuntunganya setiap hari tidak pedangang kecil menghasilkan setiap hari, tetapi ditingkat desa khususnya pakisaji susah usaha-usaha seperti itu, lebih banyak keusaha peternakan yang kemudian secara keuntungan tidak bisa dihitung secara harian atau temponya lebih lambat keuntunganya. Selain itu tantangan selanjutnya adalah tantangan belum punya usaha sama sekali, kita harus menawarkan bagaimana yang bersangkutan bisa berusaha dengan baik." (Wawancara tanggal 04 April 2019 pukul 16.00 WIB di PIPP Kota Blitar).

Bapak Khoirul Anam menyampaikan bahwa program ini tujuanya untuk meningkatkan ekonomi KRTP dengan adanya tujuan tersebut menurut beliau program ini sudah berjalan dengan baik. Kebutuhan modal sudah terpenuhi sesuai dengan apa yang diminta oleh kelompok sasaran dan bisa membantu perekonomian kelompok sasarn. Namun, masih ditemui kendala dalam pelaksanaan program jalin Matra PFK yaitu di desa masih sulit untuk mencapai keuntungan yang lebih besar setiap harinya, karena kalau hanya peternakan tidak bisa menghasilkan keuntungan setiap harinya tapi tahunan. Kebanyakan Kemudian Ibu Fifa selaku Ketua Jalin Matra PFK menyampaikan :

> "Jika melihat sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuan tentu saja kebijakan ini telah berhasil mencapai tujuan utamanya mbak. Bisa meningkatkan perekonomian krtp, dengan berkembangnya usaha krtp, pembuat kue dengan diberi bantuan berupa oven listrik , bahan kue, kini juga berkembang pesananya. Tetapi masih ada kendala-kendala dilapangan yang ditemui, misalkan untuk krtp yang pedagang kecil-kecilan belum bisa meraih keuntungan yang lebih besar, karena di desa pakisaji masih sepi, selain itu di bidang peternakan tidak bisa menghasilkan keuntungan setiap harinya, harus nunggu satu tahun baru menerima keuntungan, belum lagi nanti misalnya ternaknya meninggal, sudah berhenti disitu bantuanya dan tidak mendapatkan ganti lagi. Tetapi kita terus melkukan monitoring terus setiap bulanya mbak. (Wawancara tanggal 06 April 2019 pukul 15.00 WIB di di rumah ketua Jalin Matra PFK desa Pakisaji).

Ibu fifa menyatakan bahwa tujuan ini tercapai dengan adanya KRTP bisa mengembangkan usahanya dan terus memonitoring penerima Jalin Matra PFK. Namun masih ditemui kendala dalam pelaksanaan program jalin matra pfk ini yaitu untuk bantuan di bidang pedagang kecil susan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dikarenakan di desa masih

sepi. Selain itu peternak untuk mendapatkan keuntungan harus nunggu waktu bertahun lamanya. Selanjutnya ibu Yumelda juga menympaikan:

> “ Untuk tujuan menurut saya ya sudah tercapai. Tapi hanya beberapa belum semuanya. Karena dengan adanya program Jalin Matra PFK ini mayarakat khusunya KRTP merasa terbantu. Saya sebagai pendamping Jalin Matra desa pakisaji banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat adanya program ini. Karena dengan adanya program ini KRTP bisa mengembangkan usahanya. Ini lo mbak yang sangat di sayangkan program ini didesa masih susah untuk mendapatkan keuntungan yang besar, apalagi peternak harus nunggu lama. (Wawancara tanggal 07 April 2019 pukul 14.00 WIB di Di rumah pendamping Jalin Matra PFK desa Pakisaji).

Ibu Yumelda menyatakan bahwa Program Jalin Matra PFK ini sangat membantu untuk KRTP. Sehingga banyak KRTP yang memberikan apresiasi kepada pendamping Jalin Matra PFK desa Pakisaji. Namun dibalik pelaksanaan kebijakan ini yang sudah dirasa sangat baik dalam hal Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi KRTP untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar masih ditemui kekurangan-kekuranganya yaitu masih sulit untuk mencapai keuntungan yang lebih besar di desa pakisaji. Ibu Sarmi salah satu penerima bantuan program Jalin Matra PFK berupa kambing menyampaikan :

> “ Saya merupakan salah satu yang menerima bantuan manfaat dari kebijakan ini. Kebijakan Jalin Matra PFK yang pendananya dari pemerintah . Saya sangat bangga karena dalam kebijakan ini sangat nyata, benar-benar mendapatkan bantuan berupa kambing sesuai dengan keinginan saya mbak. Tapi ya saya harus sabar karena kalo kambing itu harus nungga jangka panjang jadinya saya untuk mendapatkan keuntungan harus nunggu satu tahun lamanya”. (Wawancara tanggal 08 April 2019 pukul 10.00 WIB di Rumah Ibu Sarmi)

Ibu sarmi sebagai penerima bantuan sanagat senang dan bangga dengan adanya program ini karena bantuan ini sanagat bermanfaat untuk beliau.

Beliau mendapatkan bantuan sesuai dengan keinginanya. Namun beliau juga mengeluhkan karena untuk mendapatkan keuntungan harus nunggu bertahun-tahun lamanya. Kemudian Ibu Sukirah penjual kue juga mengatakan hal yang sama terkait dengan ketercapaian dalam pelaksanaan program ini yaitu :

> "Iya saya juga dapat. Saya mendapatkan bantuan berupa Oven, bahan-bahan kue yang senilai Rp 2.500.000. Program ini sungguh sangat membantu saya. Saya bisa mendapatkan pesanan sangat banyak setelah menerima bantuan ini. Mbak-mbak pendamping desa juga ramah dan terus mengarahkan suapaya bantuan ini bisa berkembang. Karena saya sangat berterimakasih sama pemerintahan desa dan kini kue saya sudah berkembang semua Perangkat desa saya buatkan kue sebagai tanda terimkasih saya ke pihak pemerinah mbak.. (Wawancara tanggal 08 April 2019 pukul 13.00 WIB di Rumah Ibu Sukirah).

Ibu Sukirah menyatakan dengan adanya bantuan ini sangat membantu dan pesanan kuenya semakin banyak bentuk apresiasi bu sukirah karena bangganya mendapat bantuan ini beliau membuatkan kue untuk seluruh perangkat di Desa Pakisaaji Kecamatan Kademangan. Selain itu Ibu Kasini Perancang atau toko sembako juga menyampaikan hal serupa. Bu kasini menyampaikan :

> " Wah ya sangat bermanfaat sekali program ini. Toko saya jadi banyak isinya, Saya berharap mendapatkan bantuan lagi dari program ini. Tetapi keuntungan yang saya dapatkan tidak banyak setiap harinya mbak mungkin karena di pedesaan belum ramai pembeli. (Wawancara 08 April 2019 pukul 09.00 WIB di Rumah ibu Kasini).

Ibu kasini berharap mendapatkan bantuan ini lagi, karena sangat bermanfaat. Tetapi ibu kasini masih sedikit mengeluhkan karena keuntungan yang didapat hanya sedikit setiap harinya. Berkaitan dengan hal itu Ibu siti meyampaikan:

> “ Sudah sangat membantu saya program Jalin Matra PFK ini, dulu saya hanya pedagang kelapa kecil-kecilan karena tidak memiliki modal. Berkat bantuan ini saya bisa membeli dagangan lagi dengan banyak. Sekarang yang saya jual Kelapa dari kelapa muda samapai kelapa tua, dan pembelinya tidak hanya 1 desa tetapi beberapa desa. Program ini sangat membantu. Saya bersyukur mendapatkan bantuan ini. Dagangan saya bisa banyak dan berkembang.(Wawancara tanggal 8 April 2019 17.00 WIB di Rumah ibu siti)

Ibu siti menyampaikan bahwa sekarang usaha kelapanya berkembang pesat, bisa menjual banyak kelapa dari yang muda sampai kelapa tua. Selain itu pembeli kelapa ibu siti semaki banyak. Berdasarkan hasil wawacara beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Jalin Matra PFK di desa Pakisaji Kecamatan Kademangan secara umum maupun di lokasi penelitian dirasa sudah mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya antara lain telah berhasil Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap KRTP melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai *mothercare,* membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi KRTP untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, Mendorong motivasi berusaha dan kemampuan KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahterannya.

Namun, dalam pelaksanaanya ditemukan kendala terkait dengan tujuan program jalin matra pfk yaitu untuk memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan asset atau usaha pendapatan keluarga, kendalanya krtp di desa pakisaji setiap harinya masih sulit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena di desa pakisaji masih sepi dan bagi peternak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kentungan. Hal ini yang menghambat

kercapaian tujuan dari pada pelaksanaan kebijakan ini secara penuh di desa Pakisaji Kecamatan Kademangan. Hal ini tidak bisa di antisipasi oleh pihak desa setempat karena bantuan ini sudah disesuaikan dengan apa yang diminta oleh KRTP.

b. Efisiensi *(efficiency)*

Efisiensi *(efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan Program Jalin Matra PFK di desa Pakisaji baik ditinjau dari aspek anggaran, waktu pelaksanaanya hingga pelaksanaan kebijakannya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan ini sangatlah beragam. Keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan untuk KRTP sangat patut di acungi jempol. Dikarenakan pemerintah selalu berinovasi agar permasalahan kemiskinan untuk KRTP benar-benar dapat diatasi. Usaha-usaha yang dilakukan ditinjau dari aspek penganggaran hingga dapat dicapainya program ini dijelaskan oleh Bapak Suwoyo mengjelaskan:

> ‘‘Kami dari pihak desa yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan masyarakat atau kelompok sasaran tentu saja banyak yang harus kami lakukan untuk mencapai tujuan ini. Kami merupakan penghubung antara masyarakat atau kelompok sasaran dengan pelaksana. Usaha yang kami lakukan iyalah melakukan pendampingan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pencairan anggaran untuk kelompok sasaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur. Mekanisme anggaran Sumber utamanya dari Provinsi masuk melalui APBDesa ada pemisahan 2 anggaran, dari provinsi ditransfer masuk rekening desa nanti sudah dipisahkan mana yang kemudian bantuan usaha berupa modal kerja mana yang biaya oprasional . Biaya oprasional itu yang fungsinya honorium petugas, untuk rapat, penyusunan proposal, ATK. Sedangakan bantuan murni sekitar 2.500000 x 25 KRTP yang mendapat bantuan. Berupa modal atau barang sedangkan untuk

> sumberdaya waktu sudah sangat cukup karena sudah ber diberi waktu 1 tahun penuh. Kemudian dalam pelaksanaannya kami tampung aspirasi. Pada intinya kami harus mejalin hubungan yang baik dengan masyarakat agar meraka juga mau bekerja sama dengan kita dan mudah ketikan diajak *rembukan* (musyawarah). Namun yang di sayangkan setiap tahunya bantuan ini tetap Rp 2.500.000 per KRTP tidak pernah meningkat pertahunya. apalagi setiap tahunya harga barang-barang itu mahal belum lagi di potong pajak. Jadi KRTP hanya menerima barang sejumlah Rp. 2.350.000 saja. Terkadang kelompok sasaran sering salah faham dan protes ke desa mbak karena tahunya mereka mendapatkan RP. 2.500.000. (wawancara tanggal 04 April 2019 pukul 08.00 WIB di Kantor Desa Pakisaji).

Bapak Suwoyo mengatakan upaya-upaya yang dilakukan sebagai pemerintahan desa mendampingi dalam sosialisasi, mencairkan dana dan bertanggungjawab sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaanya masih ditemui kekurangan-kekurangan yang salah satunya program ini setiap tahunnya jumlah bantuanya tetap Rp. 2.500.000 untuk per KRTP tidak pernah meningkat dan masih dipotong pajak Rp. 150.000 per KRTP, sekarang kebutuhan untuk membeli barang atau kebutuhan sehari-hari juga meningkat setiap tahunnya. Terkadang juga ada KRTP yang protes ke desa karena mereka susah memahami adanya potongan pajak. Selain itu Bapak Khoirul Anam juga mengatakan:

> "Sebagai bukti partisipasi kami, langkah utama yang kami lakukan demi tercapainya tujuan mendorong motivasi berusaha KRTP dan kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan yang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan ini kami segera menjemput bola agar segera terealisasikan program ini. Kemudian Upaya secara prosedural sudah kita lakukan , artinya program ini sifatnya terbuka dari tahapan sosialisasi dari kabupaten hingga tingkat desa atau secara pelaksaanaan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian upaya yang lebih besar lagi upaya kita bagimana kita mefasilitasi kebutuhan-kebutuhan usaha yang kemudian bisa dilaksanakan KRTP. Disitu titik kritisnya. Kebanyakan KRTP terutama yang belum punya usaha itu ikut-ikut temannya untuk usaha, Jadi idealnya sesuai dengan arahan kita tim pendamping. Mereka

> Kita kasih pendekatan bahwa usaha itu berbasis ketrampilan dan kebutuhan. Artinya tidak boleh kemudian latah dengan usaha temanya jadi kita sesuaikan dengan lokasi tempat tinggal kemudian daerah sekitar dan bisa menetukan usaha yang tepat. Disisi lain kita sebagai pelaksana harus pintar-pintar untuk mengatur bantuan tersebut. Karena Rp. 2.500.000 saya rasa masih kurang untuk modal mbak. Karena kebutuhan sehari-hari itu kan yaa mahal sekarang ini, keuntungannya itu kan tidak seberapa mbak. Jadi saya pikir untuk kebutuhan sehari-hari krtp masih kurang " (Wawancara tanggal 04 April 2019 pukul 16.00 WIB di PIPP Kota Blitar).

Bapak Khoirum Anam menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan secara prosedural sosialisasi tingkat kabupaten sampai desa sudah dilakaukan dengan baik dan banyak pendekatan dengan kelompok sasaran. Untuk memberikan arahan kepada mereka. Namun, disisi lain masih terdapat keganjalan dimana untuk bantuan Rp. 2.500.000 per KRTP tetap sama setiap tahunya belum meningkat dan dipotong pajak. Sekarang ini kita pahami bahwa kebutuhan sehari-hari semakin mahal. Apalagi keuntungan untuk KRTP hanya sedikit. Terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan Ibu Fifa juga menyampaikan :

> "Sebagai Ketua Jalin Matra PFK Pakisaji tugas saya ikut memonitoring, penyerahan baran untuk KRTP yang menerima bantuan Jalin Matra PFK. menampung aspirasi dan keluh kesah kelompok sasaran sudah kita lakukan dengan baik. Tapi kita menemui bahwa kelompok sasaran menyampaikan aspirasinya bahwasanya mereka itu tidak paham dan kaget kalau bantuan untuk program ini dipotong pajak per KRTP jadi KRTP hanaya menerima bantuan berupa barang sesuai yang diinginkan dengan jumlah Rp. 2.500.000, kita perlu kesabaran untuk memahamkan KRTP tersebut supaya tidak salah faham. (Wawancara tanggal 06 April 2019 pukul 15.00 WIB di di rumah ketua Jalin Matra PFK desa Pakisaji)."

Monitoring, dan penyerahan barang sudah dilakuka dengan baik. Namun masih ditemukan kendala-kendala yang salah satunya penerima manfaat sulit untuk dipahamkan tentang potongan pajak, karena tahunya

mereka penuh mendapatkan Rp. 2.500.000 per KRTP. Kemudian dari pihak pendamping Jalin Matra desa Pakisaji Kecamatan Kademangan, mengenai usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Ibu Yumelda menjelaskan:

> " Kalo kami dari pihak pelaksana langsung berhadapan langsung dengan kelompok sasaran ya yang bisa kami lakukan untuk mensukseskan program ini adalah memeberikan layanan yang baik dengan ramah, tepat dan sesuai dengan prosedur kepada penerima manfaat sehingga penerima menfaat akan merasa puas dan benar-benar dapat merasakan manfaat dari program ini. Karena keberhasilan suatu program itu dapat dilihat dari *feed back* dari kelompok masyarakat puas berarti kan tujuan dari kebijakan ini berhasil. (Wawancara tanggal 07 April 2019 pukul 14.00 WIB di Di rumah pendamping Jalin Matra PFK desa Pakisaji).

Selain itu Ibu Yumelda juga menyampaikan bahwa beliau berhadapan langsung dengan KRTP untuk mengetahui keluh kesah KRTP. Supaya tujuan-tujuan dari program ini tercapai. Dari sisi penerima manfaat terkait usaha-usaha yang dilakukan oleh pelaksana. Berkaitan dengan ini Ibu kasini sebagai penerima bantuan juga menyampaikan bentuk partisipasinya:

> " usaha yang saya lakukan sebagai penerima program adalah patuh dengan instruksi dan ketentuan yang sudah ditetapkan agar program bisa dijalankan dengan baik dan lancar. Tapi yang masih mengganjal di hati itu bantuan Rp. 2.500.000 masih dipotong pajak, karema saya tidak tahu yaa saya langsung tanyakan ke desa dan tim pelaksana mbak. Bantuan segitu menurut saya ya masih kurang untuk kebutuhan sehari-hari apalagi kan tidak setiap hari saya mendapatkan keuntungan banyak. Saya berharap setiap tahunya bantuan ini meningkat "(Wawancara 08 April 2019 pukul 09.00 WIB di Rumah ibu Kasini)

Ibu Kasini selaku penerima Program Jalin Matra PFK menyampaikan usaha yang dilakukan dengan mematuhi aturan-aturan dan intruksi yang sudah ditetapkan dengan baik. Namun ibu kasini masih mengalami

keganjalan sehingga beliau beranikan untuk menannyakan ke pihak desa dan pelaksana mengenai bantuan dipotong pajak. Karena bantuan Rp. 2.350.000 masih kurang untuk memenui kebutuhan sehari-hari, beliau berharap bantuan ini setiap tahunya meningkat. Kemudian ibu siti juga menyampaikan hal serupa seperti yang disamapaikan ibu karsini. Ibu siti menjelaskan " Saya sebagai penerima bantuan program Jalin Matra PFK berusaha mematuhi prosedur-prosedur yang sudah disamapiakan waktu sosialisasi. Ditarik pajak saya juga nurut aja mbak. (Wawancara tanggal 8 April 2019 17.00 WIB di Rumah ibu siti). Sebagai penerima manfaat patuh terhadap prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Ibu Sukirah juga menyampaikan :

> " Saya sangat taat mbak dengan peraturan program jalin matra pfk ini. Karena program ini sudah membantu saya. Walau Cuma Rp 2.350.000 tetap saya syukuri, meski untungnya tidak banyak sudah bisa buat makan saya sehari-hari mbak itu untungnya. (Wawancara tanggal 08 April 2019 pukul 13.00 WIB di Rumah Ibu Sukirah).

Ibu sukirah sangat taat dengan peraturan yang ada, dengan mendapatkan keuntungan yang sedikit ibu suukirah tetap bersyukur sudah bisa makan untu sehari-hari. Kemudian Ibu Sarmi menyampaikan seperti yang disampaikan oleh ibu sukirah. Ibu sarmi menyampaikan :

> "Apapun peraturanya saya patuhi sesuai dengan prosedur mbak. Saya melapor mbak ketika ada kendala dalam bantuan ini. Semisal kambing saya waktu itu meninggal satu saya lapor ke pendamping jalin matra. Saya kira di ganti ternyata tidak. Apapun itu resikonya saya terima mbak". (Wawancara tanggal 08 April 2019 pukul 10.00 WIB di Rumah Ibu Sarmi)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan

dari program ini ialah sosialisasi sampai tanggungjawab dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa sudah berhasil dan masing-masing krtp sudah menerima batuan berupa barang atau modal senilai Rp. 2.500.000 dipotong pajak dan memberikan pelayanan yang baik untuk KRTP. Dengan waktu selama satu tahun penuh dalam pelaksanaan program ini sudah sangat cukup. Namun masih ditemui kekurangan-kekurangan antara lain bantuan Rp. 2.500.000 tetap dan tidak meningkat setiap tahunya. Sedangka kebutuhan krtp setiap tahunya meningkat

c. Kecukupan*(adequacy)*

Kecukupan *(adequacy),* Berkenaan dengan seberapa jauh hasil alternatife-alternatif yang dipakai dalam pelaksanaan kebijakan inklusif mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Artinya melalui indikator ini akan diketahui kesesuaian antara hasil yang dicapai dalam pelaksanaan dilapangan. Program ini ada tentunya dikarenakan adanya pengangguran bagi krtp yang ditinggal oleh suaminya atau menjanda. Sehingga memerlukan bantuan secara khusus di desa pakisaji kecamatan kademangan. Dengan demikian tujuan dari permasalahan ini adalah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Alternatif-alternatif yang digunakan sudah beragam antara lain dari perumusan hingga pelaksanaanya. Sejauh mana alternatif-alternatif tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di jelaskan oleh bapak Suwoyo, mengatakan :

> “Sejauh ini Program Jalin Matra PFK sudah mengatasi permasalahan yang krusial yaitu berupa sulitnya KRTP mendapatkan pekerjaan atau pengangguran dan tinggal oleh suaminya. Dengan adanya program ini KRTP benar-benar

> diberdayakan dengan mendapat bantuan berupa barang atau hewan, sesuai dengan kemampuan dan keinginan KRTP, supaya bisa dikembangkan. Kemudian program ini mampu mengentaskan kemiskinan untuk KRTP dengan diberi usaha dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan mereka.(Wawancara tanggal 04 April 2019 pukul 08.00 WIB di Kantor desa Pakisaji).

Bapak Suwoyo mengatakan bahwa Program Jalin Matra PFK ini sudah membantu dalam mengatasi permasalahan Kemiskinan untuk KRTP atau janda yang ditinggalkan oleh suaminya dengan diberi modal atau fasilitas untuk berusaha. Keumudian terkait kebijakan ini sudah berhasil dalam pemecahan masalah juga dijelaskan oleh Bapak Khoirul Anam. Beliau menjelaskan:

> "Kalo secara pelaksanan sudah berhasil, Tapi kalau diukur dari peningkatan ekonomi saya pikir perlu kemudian kita monitoring ya karena untuk jaman sekarang modal Rp 2.500.000 tidak cukup membantu untuk kebutuhan sehari-hari, artinya memang sudah membantu dalam hal permodalan sehingga mendapatkan dalam keuntungan, tapi kemudian untuk keuntungan yang jumlah besar perlu waktu, karena jumlahnya masih terbatas".(Wawancara tanggal 04 April 2019 pukul 16.00 WIB di PIPP Kota Blitar).

Begitupun Bapak Khoirul Anam Juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program ini sudah berhasil. Namun, kalau diukur dari ekonomi perlu adanya monitoring. Karena untuk jaman sekarang modal Rp. 2.500.000 belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut membuat keuntungan lebih besar perlu waktu. Selanjutnya terkait dengan kebijakan ini telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Pakisaji Kecamatan Kademangan, Ibu fifa menyampaikan:

> "Dari hasil yang kita amati di lapangan pelaksanaan dari pada kebijakan ini bukan hanya memecahkan masalah mengenai pengagguran untuk KRTP dan menunjang perekonomian KRTP, tetapi kita juga menyaring keluhan-keluhan KRTP dan setelah itu kita sebagai tim program jalin

> matra bisa berkoordinasi dan membuat laporan. (Wawancara tanggal 06 April 2019 pukul 15.00 WIB di di rumah ketua Jalin Matra PFK desa Pakisaji).

Ibu Fifa juga menyampaikan bahwa dari hasil yang beliau amatai dilapangan Program Jalin Matra PFK ini sudah membantu memecahkan masalah mengenai pengangguran KRTP dan menunjang perekonomian KRTP. Kemudian terkait hal itu Ibu Yumelda pendamping Jalin Matra PFK desa Pakisaji mengatakan :

> "ya tentu saja sudah berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari dulu bantuan yang diberikan pemerintah hanyalah bantuan berupa uang sekalai pakai kan habis. Tetapi Kalo Program Jalin Matra PFK ini beda lagi diberikan bantuan berupa modal atau barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kelompok sasaran, nantinya bisa untuk dikembangkan dalam jangka panjang. Prosesnya untuk Program ini juga cepat jadi tidak dipersulit bahkan tetap kita pantau usaha KRTP walau programnya sudah selesai. Kita sebagai pendamping juga masih bisa wajib laporan mbak. Jadi menurut saya adanya kebijakan ini sangat membantu memecahkan permasalahan KRTP yang yang dihadapi KRTP terutama masalah ekonomi". (Wawancara tanggal 07 April 2019 pukul 14.00 WIB di Di rumah pendamping Jalin Matra PFK desa Pakisaji).

Berkaitan dengan hal tersebut Ibu Yumelda menyampaikan bahwa Program Jalin Matra PFK ini sudah dapat menyelesaiakan permasalahan yang ada untuk KRTP. Karena Progam Jalin Matra PFK ini untuk jangka panjang tidak hanya sekali habis dan Program PFK ini walau sudah selesai tetap dipantau oleh tim jalin Matra PFK desa Pakisaji Kecamatan Kademangan. Kemudian jika melihat apakan kebijakan ini telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada dilihat dari sudut pandang penerima program, maka Ibu Kasini berendapat bahwa :

> "oh ya sangat berhasil membantu permasalahan saya untuk masalah finansial maupun ekonomi. Saya benar-benar diberi modal sesuai keinginan saya dengan prosedur yang sangat mudah begitupun

pelayanan petugas Jalin Matra PFK juga ramah-ramah". (Wawancara 08 April 2019 pukul 09.00 WIB di Rumah ibu Kasini).

Sebagai Penerima bantuan Ibu Kasini berpendapat bahwa Program Jalin Matra PFK sangat membantu beliau dalam maslah finansial ataupun ekonominya. Karena bantuan ini disesuaikan dengan keinginan mereka untuk dikembangkan. Selanjutnya Ibu siti juga berpendapat bahwa:

"Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa program ini sangat membantu saya dan sangat menunjang perekonomian saya. Saya ini janda beranak 2 karena sudah bercerai dengan suami saya selama 2 tahun karena tidak di nafkahi. Dengan melalui kebijakan ini, selama saya patuh dengan instruksi dan prosedurnya saya bisa melakukan dan mengembangkan usaha ini dengan baik. (Wawancara tanggal 8 April 2019 17.00 WIB di Rumah ibu siti)

Ibu siti juga menjelaskan bahwa Program Jalin Matra PFK ini sudah membantu perekonominya semenjak ditinggal suaminya. Selama beliau mematuhi peraturan dan prsedur yang ada Program ini akan berjalan dengan baik. Kemudian Ibu sarmi juga menyampaikan :

" Program ini begitu sangat membantu saya, saya tidak usah hutang ke tetangga saya mbak, kalau butuh uang yang mendesak tinggal jual kambing saya". (Wawancara tanggal 08 April 2019 pukul 10.00 WIB di Rumah Ibu Sarmi).

Program ini membantu ibu sarmi tidak lagi dililit hutang. Selanjutnya ibu sukirah menyampaikan :

" Saya bersyukur mendapatkan bantuan ini mbak, keuntungan yang saya dapatkan bisa saya belikan susu cucu saya karena cucu saya ditinggal oleh ibunya yang sudah sakit lama , jadi saya ini sudah janda masih ditinggali cucu satu yang masih balita. Saya berterimakasih dengan adanya program ini".(Wawancara tanggal 08 April 2019 pukul 13.00 WIB di Rumah Ibu Sukirah).

Dari Pemaparan diatas yang disampaikan oleh informan mengenai alternatife-alternatif yang ada untuk memecahkan masalah sudah berhasil

atau belum dapat disimpulkan sebagai berikut Permasalahan ini sudah bisa meneyelesaiakan permasalahan yang ada. Namun Program ini perlu adanya sebuah antisipasi agar program ini menjadi semakin baik walau sistemnya suatu saat nanti akan berubah.

d. Kesamaan *(equity)*

Kesamaan*(equity)* Berkenaan dengan keadilan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kebijakan Program Jalin Matra PFK untuk KRTP di lapangan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak entah itu implementor maupun kelompok sasaran. Berkaitan dengan kemanfaatan dari pelaksanaan kebijakan ini tentu yang sangat merasakan manfaatnya ada kelompok sasaran karena kelompok sasaran benar-benar bisa mendapatkan fasilitas permodalan untuk Program Jalin Matra PFK. Berkaitan dengan hal ini Bapak Suwoyo menyampaikan :

> "Kebijakan ini ada dikarenakan adanya Peraturan Gubernur No 14 tahun 2017 bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di jawa timur, Daerah Provinsi melaksanakan program Jalin Matra PFK. Maka dari itu kami yang merupakan salah satu institusi tersebut bertanggungjawab untuk ikut serta dalam mewujudkannya. Jadi manfaatnya ya kami sudah berhasil melakukan kewajiban kami sebagai pelaksana. Selain itu dengan kerja sama antara kami dan pemerintah DPMD Kabupaten Blitar akan semakin baik di mata masyarakat, membentuk stigma yang positif tentang kami dan masyarakat semakin percaya dengan kinerja kami. Jadi sangat bermanfat. Warga khususnya KRTP dengan mudah mengembangkan usaha mereka dengan modal yang sudah diberikan sesuai dengan keinginan mereka". (wawancara tanggal 04 April 2019 pukul 08.00 WIB di Kantor Desa Pakisaji).

Dengan adanya Peraturan Gubernur No 14 Tahun 2017 dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di jawa timur pemerintah pusat maupun daerah provinsi jawa timur melaksanakan program

Jalin Matra PFK. Manfaat tersebut sudah dirasakan oleh beliau sebagai pelaksana dalam ikut serta tanggungjawab dalam mewujudkan program ini. Dengan bekerja sama dengan DPMD Kabupaten Blitar membuat program ini berjalan dengan lancar. Kemudian mengenai manfaat yang sudah dirasakan oleh semua pihak yang perilakunya dipengaruhi oleh pelaksana kebijakan ini, Bapak Khoirul Anam menjelaskan:

> "Kalo manfaat, dari sisi sasaran ada kepedulian pemerintah provinsi ataupun kabupaten dan desa bahwasanya mereka diperhatikan, artinya ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa diperhatikan, karena program ini bersifat tidak hanya memberikan bantuan program, tetapi kita terlibat aktif disana untuk sering kita dialog terkait dengan kindisi-kondisi mereka terutama shering terkait usahanya artinya mereka diperhatikan secara psikis bahwasanya kelompok yang kurang mampu menhadapi masalah sehari-hari tetapi ada bantuan modal disana disamping itu ada pendamping desa atau kabupaten yang kemudian diajak shering terkait aktivitas mereka terutama aktivitas ekonomi. (Wawancara tanggal 04 April 2019 pukul 16.00 WIB di PIPP Kota Blitar)

Dari segi manfaat ada kepeduliaan Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten dan desa yang memperhatikan kelompok tertentu. Karena tidak hanya memberikan program Jalin Matra PFK. Namun, Sebagai Tim pelaksana terlibat aktif untuk dialog bersama KRTP tersebut. Untuk mengetahui keluh kesah KRTP yang kurang mampu selain itu KRTP diajak dialog tentang aktivitas ekonomi mereka. Jadi Sebagai Tim Jalin Matra PFK mereka tetap diperhatikan. Kemudian Ibu fifa juga menyampiakan:

> "kami sebagai tim pelaksana salah satu tujuan kami adalah membantu masyarakat khususnya KRTP yang menerima bantuan Program Jalin Matra PFK ini dengan senang hati dan adil. Kewajiban kami memonitoring dan terlibat secara aktif untuk menyaring apa yang dikeluhkan oleh KRTP tersebut. Selain itu kita juga melakukan pengarahan untuk KRTP. Jadi manfaatnya bagi kami tujuan tercapai dan KRTP bisa membantu KRTP untk meningkatkan perekonomianya.

> (Wawancara tanggal 07 April 2019 pukul 14.00 WIB di Di rumah pendamping Jalin Matra PFK desa Pakisaji).

Sebagai Tim pelaksana tujuanya untuk membantu KRTP dengan senang hati sedangkan kewajibanya mengarahkan, memonitoring dan terlibat secara aktif dalam program Jalin Matra PFK ini. Selajutnya Ibu Yumelda mengenai pemanfaat juga menyampaikan hal serupa seperti Ibu Fifa. Beliau menjelaskan:

> "kami pelaksana yang langsung bersentuhan langsung dengan lapisan kelompok sasaran sebagai penerima program tentunya sangat diuntungkan sekali dengan kebijakan ini. Karena dulu sebelum ada kebijakan Jalin Matra PFK ini sangat bingung untuk mengatasi pengangguran untuk KRTP yang sudah ditinggal oleh suaminya. Karena untuk membiayai sekolah anakkapun tidak mampu. Jadi dengan adanya Program ini tidak bingung-bingung lagi untuk mencari cara untuk membantu KRTP tersebut. (Wawancara tanggal 07 April 2019 pukul 14.00 WIB di Di rumah pendamping Jalin Matra PFK desa Pakisaji).

Sebagai Tim pelaksana beliau langsung berhadapan dengan KRTP yang menerima bantuan Jalin Matra PFK. Manfaat yang dirasakan pelaksana dengan adanya Program ini tidak susah lagi untuk mebantu KRTP. Kemudian dari segi kemanfaatan Ibu Sarmi sebagai penerima bantuan, menjelaskan "Tentu saja saya sangat merasa diuntungkan sekali dengan adanya program ini. Karena saya memiliki modal usaha untuk menunjang perekonomian keluarga saya. Tidak lagi berhutang ketetangga" (Wawancara 08 April 2019 pukul 09.00 WIB di Rumah ibu Kasini) .

Program Jalin Matra PFK ini sangat membantu ibu Karsini beliau tidak lagi berhutang lagi ketetngganya. Karena dengan program ini sudah cukup keuntungan yang diperoleh dari toko perancanganya. Kemudian Ibu Siti

juga menyampaikan pendapat yang sama seperti peserta sebelumnya yaitu Ibu Kasini. Beliau menyampaikan :

> "sangat bermanfaat bagi saya. Mengingat biaya hidup sehari-hari sekarang ini mahal apa-apa mahal saya sebagai janda sangat berarti berapapun itu bantuan. Karena bantuan ini bisa saya kembangkan dan cukup lumayan banyak keuntungan yang saya dapatkan.(Wawancara tanggal 8 April 2019 17.00 WIB di Rumah ibu siti).

Ibu siti Menyampaikan dengan adanya program ini ia sangat tembantu untuk kehidupan sehari-harinya. Sebagai *single perent* susah untuk mendapatkan modal sejumlah itu. Kemudian ibu Sukirah juga menyampaikan "Bermanfaat sekali mbak, bisa untuk saya kembangkan dikit demi sedikit saya tlateni mbak" . (Wawancara tanggal 08 April 2019 pukul 13.00 WIB di Rumah Ibu Sukirah).

Bantuan ini bermanfaat bagi ibu sarmi. Selanjutnya menurut Ibu Sarmi,menyampaikan "Bantuan ini menurut saya bermanfaat, saya janda tidak memiliki sawah pengahsilan saya saat ini hanya menjual hewan peliharaan saya untuk kehidupan sehari-hari mbak". (Wawancara tanggal 08 April 2019 pukul 10.00 WIB di Rumah Ibu Sarmi).

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa manfaat dari kebijakan ini sudah mampu dirasakan oleh semua pihak entah dari Tim Jalin Matra PFK maupun dari Kelompok sasaran. Pada dasarnya intinya pihak pelaksana berhasil memberikan layanan terbaik untuk KRTP melalui Program ini. Dimana hal itu merupakan suatu kewajiban dan kelompok sasaran pun senang bisa menerimanya haknya yaitu Program Jalin Matra PFK dengan mudah.

e. Responsivitas *(responsiveness)*,

Responsivitas *(responsiveness),* Berkenaan dengan seberapa jauh tanggungjawab implementor terhadap pelaksanaan kebijakan dan sejauh mana kebijakan Program Jalin Matra PFK untuk KRTP mendapat respon atau tanggapan dari kelompok sasaran yang perilakunya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan Jalin Matra PFK untuk KRTP di Kabupaten Blitar. Kebijakan Program Jalin Matra PFK bagi KRTP di Kabupaten Blitar adalah suatu kebijakan yang dinilai sangat menguntungkan kelompok sasaran. Karena hal ini antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan adanya kebijakan ini. Implementor punya tanggung jawab dalam melaksanakan hingga kebijakan ini dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk memberi respon terhadap pelakasanaan kebijakan ini. Berkaitan dengan tanggungjawab pelaksana dan respon masyarakat terhadap kebijakan Bapak Suwoyo menjelaskan :

> "Sebenarnya saya sebagai Kepala Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan saya tidak faham sepenuhnya terkait dengan pelaksanaanya ya. Yang pasti tanggung jawab kami adalah menerima anggaran dari Kabupaten Blitar yang kemudian nantinya akan di distribusikan ke kelompok sasaran yang menrima bantuan program ini mbak. Kalau saya melihat secara umum program ini mulai diluncurkan pada tahun 2017 di desa Pakisaji Kecamatan Kademangan. Respon masyarakat sangat baik terutana KRTP Karena bantuan ini sangat membantu khusunya untuk janda-janda. Tetapi respon krtp lain yang belum mendapatkan protes bahwasanya program ini itu hanya seagian yang mendapatkan belum mndapatkan semuanya krtp yang ada di desa pakisaji. (wawancara tanggal 04 April 2019 pukul 08.00 WIB di Kantor Desa Pakisaji).

Bapak Suwoyo sebagai Kepala Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan beliau tidak sepeuhnya faham terkait dengan pelaksanaanya . Namun,

Tanggungjawabnya adalah menerima dana dari Kabupaten Blitar yang kemudian akan di salurkan Ke Kelompok Sasaran. Dengan adanya Progam ini respon masyarakat terutama krtp sangat baik yang sudah mendapatkanya. Tetapi diluar ditemui ada krtp yang menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak desa karena beberapa krtp belum mendapatkan bantuan program jalin matar pfk ini. Terkait dengan hal ini Bapak Khoirul Anam juga menyampaikan :

> "Jadi begini kalo masalah tanggungjawab, kita kan punya sistem pemantau berjenjang, hadir setelah program dilaksanakan, sudah terlaksanakan dengan baik, kita punya media teknologi informasi jadi ada website khusus, ada kita samapaikan perkembangan mereka disana, kita profilkan, Jadi kita bantu pemasaranya di *http://mothercarejatim.id*, nanti saya konfirmasi disana, sebagain profil sebagain besar aktifitas mereka sekaligus lakukan promo, kita tampilkan krtp inspirastif, yang artinya dari kebiasaan mereka yang tidak berdaya setelah kita damping kita bantu dan kita beri modal kemudian mereka ada kebangkitan dari mereka , mereka mampu berusaha, mereka punyai semangat baru untuk berkatifitas karena mereka merasa bertanggung jawab karena mempunyai anak,bisa lebih giat, mungkin itu yang dirasakan mereka secara dapat psikologis, walapun mungkin bantuan modal tidak seberapa besarnya. Tapi mereka merasa ada kepedulian dari masyarakat lain. Sedangkan untuk Tanggapanya bagus, secara tidak ada complain istilahnya ,mereka senang, Kemudian mereka minta ada tingkatan lanjutan, yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau desa dalam bentuk-bentuk yang lain, karena pembinaan kelompok kecil terutama kurang mampu baik secara pengetahuan SDM ataupun secara akses finansial , karena akses keperbankan juga tidak mungkin karena tidak punya jaminan dan pengetahuan, kemudian pengetahuanya terbatas, kalo tidak difasilatasi oleh pemerintahan kabupaten atau desa mereka akan sulit berkemabang. Kuncinya melakukan pembinaan dari kabupaten maupun desa kemudian dilakukan tahapan selanjutnya mungkin dengan pelatihan -pelatihan denagna instansi terkait, mungkin dengan kerajinanan makanan bisa dengan indak kalo sudah punya prodak makanan nya bagaimanna difasilatasi pengemasanya , fasilitasnya. .Disisi lain ada krtp di desa pakisaji kecamatan kademangan ketika saya berkunjung ke desa ada krtp yang complain bahwasanya program ini masih ditemukan beberapa orang belum mendapatkanya. Dan krtp yang complain tersebut meminta di daftar

untuk mendapatkan program ini. (Wawancara tanggal 04 April 2019 pukul 16.00 WIB di PIPP Kota Blitar)

Gambar 3. website *mothercare* jawa timur
Sumber : http// *mothercarjatim.id*, 2019

Terkait tanggungjawab dan respon, Setelah dilaksanakan Program Jalin Matra PFK untuk KRTP akan dipantau berjenjang melalui website *http://mothercare.jatim.id*. Dalam website tersebut akan disampaikan perkembangan, kemudian di profilkan dan dibantu untuk memasarkan. Diprofil tersebut akan muncul KRTP inspiratif. Maksut dari wanita

inspiratif ini adalah dari kebiasaan mereka yang tidak berdaya kemudian mereka memiliki kemauan untuk berusaha, mempunyai semangat baru untuk beraktifitas. Dengan begitu mereka merasa mendapat perhatian atau respon dari masyarakat lain atau luar. Kemudian terkait dengan tanggungjawab sebagai pelaksana di desa Pakisaji Kecamatan Kademangan dan respon masyarakat yang mendapatkan bantuan, Ibu Fifa menjelaskan :

> "Tugas kami pelaksana adalah tugas yang sangat krusial. Tanpa adanya pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat atau kelompok sasaran maka suatu program tersebut tidak akan bisa mencapai sebuah keberhasilan karena pelaksanaannyapun akan nihil. Tanpa dilaksanakan program tidak akan menununjukkan hasilnya. Jadi tanggungjawab kami adalah melaksanakan program ini sesuai prosedur yang telah ditetapkan, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat atau KRTP dan berupaya memperbaiki hal-hal yang mengenai pelaksanaanya yang kurang baik. Tim pelaksana atau pihak desa disini juga sangat mendukung adanya kebijakan ini dengan membantu jalannya proses kebijakan ini di desa ini. Saya juga terbantu oleh antusiasme masyarakat. Ada sekitar 25 KRTP yang mendapatkan program bantuan Jalin Matra PFK ini dengan bermacam-macam modal yang diberikan disini dengan bantuan program ini dan saya pastikan sudah terlayani sesuai prosedur. Ada beberapa krtp yang tidak terdaftar sebagai penerima program dating kerumah mbak. Mereka menyampaikan aspirasinya kenapa krtp tersebut tidak mendapatkan bantuan jalin matra pfk sedangkan mereka krtp yang sangat membutuhkan, ya saya jawab kalau data itu data lama. (Wawancara tanggal 06 April 2019 pukul 15.00 WIB di di rumah ketua Jalin Matra PFK desa Pakisaji).

Ibu Fifa menyampaikan bahwa dengan tidak adanya pihak pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat atau kelompok sasaran suatu program tersebut tidak akan bisa mencapai keberhasilan. Jadi sebagai Tim Jalin Matra PFK tanggungjawab beliau melaksanakan progam Jalin Matra PFK sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dengan

memberikan pelayanan yang baik terhadap kelompok sasaran. Semua pihak yang terlibat dalam Jalin Matra PFK ini mendukung dengan adanya Program ini. Kemudian Ibu Yumelda selaku pendamping desa juga menyampaikan seperti yang disampaikan oleh ibu fifa, Ibu Yumelda mejelaskan :

> "seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya kami pelaksana yang langsung berhadapan langsung dengan masyarakat bertugas mendistribusikan modal berupa barang-barang yang disesuaikan dengan keinginan kelompok sasaran. Tanggungjawab kami selanjutnya setelah terlaksana adalah mengumpulkan memonitoring dan menangkap aspirasi masyarakat mengenai kurangnya fasilitas modal yang mereka terima atau menampung pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai program ini dan kami salurkan nantinya kepada pusat. Saya lihat sejauh ini masyarakat merasa nyaman dan senang mendapatkan bantuan ini. Tetapi ada sedikit complain dari krtp lain mbak yang belum mendapatkan program ini.". (Wawancara tanggal 07 April 2019 pukul 14.00 WIB di Di rumah pendamping Jalin Matra PFK desa Pakisaji).

Sebagai Pelaksana berhadapan langsung dengan kelompok sasaran bertugas untuk mendistribusikan barang-barang yang sudah di inginkan sesuai dengan kemampuan kelompok masyarakat. Kemudian Tanggungjawabnya sebagai pelaksana adalah mengumpulkan aspirasi masyarakat mengenai fasilitas modal yang telah diberikan kepada kelompok sasaran atau menampung pertanyaan-pertanyaan mengenai program ini. Respon masyarakat selama ini nyaman dan sennag mendapatkan bantuan ini. Dari sisi masyarakat terkait dengan tanggungjawab dan responnya Ibu Sarmi menyampaikan:

> "saya berkewajiban patuh dengan prosedur yang ada dan saya sangat puas dengan Program yang sudah diberikan begitupun denga pelayanan yang saya terima dari Tim Jalin Matra PFK. Pelayanan yang baik dan ramah yang saya terima ini dikarenakan saya selalu menjalani peraturan

> yang ada. (Wawancara tanggal 08 April 2019 pukul 10.00 WIB di Rumah Ibu Sarmi).

Penerima sasaran berkawajiban untuk mematuhi prosedur yang ada. Selain itu penerima sasaran sangat puas dengan adanya bantuan ini. Dengan pelayanan yang diberikan oleh tim Jalin Matra PFK baik dan ramah. Kemudian Ibu Kasini juga menyampaikan hal yang sama. Beliau menyampaikan :

> "iya sejauh ini saya sangat puas dengan pelayanan yang diberikan walaupun saya mendapatkan modal usaha berupa barang secara gratis. Saya tetap patuh dengan aturan yang ada. Pelayanan yang diberikan oleh Tim Jalin Matra PFK juga ramah dan tidak terbelit-belit". (Wawancara 08 April 2019 pukul 09.00 WIB di Rumah ibu Kasini).

Ibu Kasini menyampaikan Sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Tim Jalin Matra PFK di desa Pakisaji Kecamatan Kademangan. Beliau juga tetap meatuhi prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Demikian sama halnya denga apa yang disampaikan Ibu Siti. Beliau menyampaikan :

> "tentu saja saya sangat merasa puas dengan pelayanan yang saya dapatkan. Sudah mendapatkan modal, tetapi tetap mendapatkan pelayanan yang baik dari Tim Jalin Matra PFK. Saya rasa pemerintah kabupaten Blitar telah berhasil menjalankan kebijakan ini". (Wawancara tanggal 8 April 2019 17.00 WIB di Rumah ibu siti).

Respon ibu siti selaku penerima bantuan program Jalin Matra PFK sangat puas dengan pelayanan yang sudah didapatkan. Selain dengan mendapatkan modal, namun pelayanan yang diberikan sangat baik. Dengan begitu Program ini yang ada di Kabupaten Blitar terutama desa pakisaji kecamatan kademangan akan berhasil dalam menjalani kebijakan ini. Selain itu ibu Sukirah juga menyampaikan "Sangat puas sekali mbak

dengan adanya bantuan ini, membantu permodalan kue saya sehingga ekonomi saya terangkat dikit demi sedikit. Saya harap keepanya program ini lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara diats dapat disimpulkan bahwa semua lapisan dari lapisan pelaksana DPMD Kabupaten Blitar hingga pelaksana dari sektor terkecil yaitu desa sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan prosedur yang ada dan respon kelompok sasaran juga bagus. Hal ini ditandai dengan kerjasama kelompok sasaran yang ikut serta menjalankan kebijakan sesuai prosedur dan melapor jika ada masalah. Namun masih ditemui krtp yang membutuhkan belum tedaftar sebagai penerima program jalin matra pfk .

f. Ketepatan *(appropriateness)*

Ketepatan *(appropriateness)* Berkenaan dengan alternatif yang dipilih dalam melaksanakan kebijakan program Jalin Matra PFK untuk krtp merupakan rekomendasi alternatif yang layak untuk mencapai tujuan kebijakan inklusif yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan kelayakan alternatif-alternatif yang pilih untuk mencapai tujuan kebijakan ini Bapak Suwoyo menyampaikan :

> “Saya menilai kebijakan Jalin Matra PFK ini merupakan alternatif paling layak dalam mencapai tujuan kebijakan ini. Tercapainya tujuan kebijakan ini karena pencairan dana untuk kelompok sasaran dilakukan oleh pihak kami. Jadi kami yang bertanggungjawab. Jadi ketika ingin mencairkan dana untuk di distribusikan tidak perlu melalui proses yang panjang. Artinya tidak perlu ke pusat langsung pihak desa yang mencairkan karena pihak pusat sudah mentransfer ke desa. kemudian Tim Jalin Matra PFK membelikan barang sesuai dengan yang diinginkan oleh kelompok sasaran. Himbauan kami supaya modal atau

> barang yang sudah diberikan itu dapat dikembangkan untuk jangka panjang. Kemudian didukung dengan sosialisasi yang jelas kepada KRTP dengan bertatap muka langsung dan pengawasan yang akan menumbuhkan hasil yang manis. Dalam pelaksanaan program jalin matra pfk di desa pakisaji kecamatan kademangan ditemui hal yang tidak diiinginkan, dimana kelompok sasaran yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dan mendapatan bantuan program jalin matra pfk ini.(wawancara tanggal 04 April 2019 pukul 08.00 WIB di Kantor Desa Pakisaji).

Kebijakan Jalin Matra PFK ini merupakan alternatif yang paling baik dalam mencapai tujuan kebijakan ini. Pihak desa sangat bertanggungjawab karena pencairan dana untuk kelompok sasaran ini dilakukan oleh pihak desa itu sendiri. Anggaran tersebut sudah masuk APBdesa Pakisaji Kecamatan Kademangan. Dengan begitu tidak perlu lagi mencairkan dana kepusat. Setelah itu Tim Jalin Matra PFK langsung membelikan barang-barang yang diinginkan oleh kelompok sasaran untuk dikembangkan. Namun dalam pelaksanaan program jalin matra pfk ini tidak tepat sasaran dimana orang yang sudah meninggal tetap terdaftar sebagai peenrima program jalin matra pfk. Kemudian terkait dengan kelayakan alternatif yang dipilih selama ini dalam usaha mencapai tujuan program Bapak Khoirul Anam menyampaikan:

> "Jadi begini, Kalo sesuai dengan tahapan kita punya tahapan pedoman disana dijelaskan secara umum dan detail bagaimana tahapan-tahapan pendapingan disana terkait tindakan, kondisi dan situasi dilapangan, tentunya kita dari pihak pendamping kita dituntut untuk lebih aktif dan kreatif dalam menangai permasalahan yang ada jadi kita sudah punya SOP mulai dari awal sampai akhir dari sosialisasi, pelaksanaan, rembug-rembug, kemudian menyampaikan program ini kepada masyarakat sampai pertanggungjawaban Jadi kita dituntut lebih aktif terkait kasus kasus ditingkat desa terutama untuk peneutuan sasaran. Tentunya ada permasalahan-permasalahan tentang sasaran atau kelompok-kelompok jadi upaya kita memberitahukan kepada pihak desa atau stakeholder yang ada disana, bahwasanya program ini harus tepat sasaran, tepat manfaat atau penggunaan, kita melangkah kearah

> dampak artinya kita berusaha semaximal mungkin untuk kemudian bahwa usaha yang dilakukan itu bukan sekedar kita melakukan usahanya, tetapi usaha diprioritaskan untuk usaha yang diproritaskan untuk berputaran ekonominya sifatnya keseharian seperti ini. Kita punya prioritas itu, Pendekatan kedua dengan usaha yang memungkinkan disana karena potensi setiap desa tidak sama disetiap desa, misalkan didekat kota usaha yang sifatnya jual beli yang capslonya bisa diambil setiap harinya memungkinkan. Tapi kalo masalah sasaran itu tidak tepat sasaran, kita menganut data dari pusat, nah data dari pusat itu masih ada saja daftar penerima bantuan jalin matra pfk yang sudah meninggal. .(Wawancara tanggal 04 April 2019 pukul 16.00 WIB di PIPP Kota Blitar).

Sebagai Pelaksana atau koordintor dari DPMD Kabupaten Blitar menyesuaikan dengan pedoman tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur yang ada terkait dengan pendampingan Jalin Matra PFK. Pelaksanaan dituntut untuk aktif dan kreatif dalam menangani permasalahan yang ada di lapangan terutama mengenai sasaran. Jika ada permasalahan mengenai sasaran atau kelompok-kelompok dari pihak pelaksana kabupaten blitar memberitahukan kepada pihak desa bahwa program ini harus tepat sasaran, berusaha semaximal mungkin Jadi pihak pelaksana ini sudah memiliki SOP mulai dari sosialisasi hingga peratnggungjawaban. Tetapi dalam pelaksanaanya masih saja ditemui program jalin mtra pfk initidak tepat sasaran. Kemudian terkait dengan kelayakan alternatif yang dipilih selama ini dalam usaha mencapai tujuan program Ibu Fifa menyampaikan :

> “Dengan melakukan sinergi dengan semua pelaksana yang terlibat langsung dengan kebijakan ini saya rasa sangat efektif dan membuat kebijakan ini akan segera dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran. Karena tugas dan kewajiban akan di bagi sedemikian rupa sehingga akan lebih cepat dalam pelaksanaannya. Ini adalah alternatif yang begitu layak agar masyarakat segera dapat merasakan pelayanan yang diberikan, bukan hanya sekedar wacana. Ya sayangnya cuma satu mbak tidak tepat sasaran program ini karena datanyasudah diatur dari atas kita sebagai pelaksana hanya menjalankan sesuai dengan prosedur dan data

yang sudah ada (Wawancara tanggal 06 April 2019 pukul 15.00 WIB di di rumah ketua Jalin Matra PFK desa Pakisaji).

Menurut ibu fifa melakukan sinergi dengan semua pelaksana yang terlibat langsung dalam kebijakan Jalin Matra PFK sangat efektif. Dimana kebijakan ini akan cepat dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran atau KRTP. Dengan tugas dan kewajiban sudah di bagi sedemikian rupa sehingga akan lebih cepat dalam pelaksanaanya. Hal ini merupakan alternatif yang layak. Agar masyarakat juga cepat merasakan pelayanan yang diberkan bukan hanaya sekedar wacana saja. Namun dalam pelaksanaan program ini masih ditemui tidak tepat sasaran Berkaitan dengan ini Ibu Yumelda juga menilai dengan pendapat yang tidak jauh berbeda. Beliau menyampaikan :

> "Alternatif ini saya nilai sangat efektif karena pemerintah kabupaten blitar hanya melakukan pengawasan saja dan menyerahkan tugas kelola pendanaan kepada pihak desa. Jadi pemerintah Kabupaten Blitar cukup fokus pada usaha perbaikan insfrastruktur fasilitas Jalin Matra PFK dan perbaikan program. karena alokasi dan distribusi dana sudah di transfer ke pihak desa. Jadi mereka akan lebih fokus, sedikit yang mengganjal dalam program ini yaitu tidak tepat sasaran. Data lama seharusnya diperbatui dengan yang baru". (Wawancara tanggal 07 April 2019 pukul 14.00 WIB di Di rumah pendamping Jalin Matra PFK desa Pakisaji).

Ibu Yumelda mengatakan bahwa altrenatif ini sanagat bermanfaat karena pemerintah kabupaten blitar hanya melakukan pengawasan saja dan menyerahkan tugas kepada desa setelah uang sudah di transfer ke APBDes. Jadi Pemerintah Kabupaten hanya cukup fokus pada perbaikan infrastruktur fasilitas Kebijakan Jalin Matra PFK ini. Dari sisi penilaian penerima program, mengenai kelayakan alternatif yang dipilih maka Ibu Sukirah mengatakan:

> "saya tidak faham mengenai alternatif-alternatif. Yang terpenting yang saya ketahui mengenai sosialisasinya bagus, tatap muka langsung sehingga jelas kemudian pihak Desa dan Tim Jalin Matra PFK juga menerima keluhan-keluharan dari kami menanganinnya dengan cepat. Dan merut saya itu bagus sekali" (Wawancara tanggal 08 April 2019 pukul 13.00 WIB di Rumah Ibu Sukirah)

Terkait hal tersebut ibu sukirah menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang alternatif-alternatif . Beliau hanya mengetahui tentang sosialisasi dengan bertaatap muka langsung sehingga jelas kemudian pihak desa dan Tim Jalin Matra PFK juga menerima semua keluhan-keluhan dari kelompok sasaran dengan cepat. Ibu Sarmi juga menyampaikan pendapat yang sama. Beliau menyampaikan "program ini sangat layak untuk saya. Saya bisa mendapatkan modal untuk usaha dan kemudian bisa saya kembangkan. Sosialiasinya juga jelas dan udah dimengerti". (Wawancara tanggal 08 April 2019 pukul 10.00 WIB di Rumah Ibu Sarmi).

Ibu sarmi berpendapat seprti yang disamapiak oleh ibu Sukirah bahwa Program Jalin Matra PFK sangat layak. Karena dengan adanya program ini beliau bisa berusasa atau berkreatifitas dengan modal yang diberikan sesuai dengan ketrampilan mereka. Selain itu sosialisasi juga jelas dan mudah untuk dimengerti. Kemudian Ibu Kasini juga menyampaikan pendapat yang sama. Beliau menyampaikan :

> "maksudnya caranya dari sosialisasi sampai sekarang, tentu saja layak. Mula-mula ada sosialisasi kemudian setalah dilaksanakan juga ada pengawasan dan pemerintah juga cepat tanggapannya dalam menanggapi keluhan. Saya nilai sangat layak". (Wawancara 08 April 2019 pukul 09.00 WIB di Rumah ibu Kasini).

Ibu kasini menyampaikan bahwa program ini tentu saja layak. Dengan adanya sosialisasi kemudian dilaksanakan juga ada pengawasan. Selain itu pemerintah juga cepat tanggap Selain itu ibu siti juga menyampaikan:

> "Sangat layak sekali ya program ini dari awal hingga akhir ya baik-baik saja, saya pikir program ini perlu dilanjutkan, karena sangat layak untuk membantu krtp yang membutuhkan". (Wawancara tanggal 8 April 2019 17.00 WIB di Rumah ibu siti).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa alternatif-alternatif yang dipakai sangat layak untuk mencapai tujuan kebijakan ini. Namun masih ditemui kekurangan dalam kriteria ketepatan ini yaitu tidak tepat sasaran. Dimana kelompok sasaran yang sudah meninggal dunia tetap terdaftar sebagai penerima program jalin matra pfk.

E. Analisis Data

Kebijakan publik secara sederhana adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah Thomas R Dye dalam Agustino (2012: 7). Secara lebih jelas Islamy (2009: 17-18) juga mengemukakan bahwa "kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan". Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu :

a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

Demikian juga program jalin matra PFK untuk untuk KRTP dilatar belakangi karenya ada permasalahan yaitu banyaknya KRTP yang tidak berdaya untuk menunjang ekonomi keluarganya karena ditinggalkan oleh

suaminya atau diceraiakan oleh suaminya. Kebijakan ini juga dilatar belakangi adanya Peraturan Gubernur No 14 tahun 2017 tentang pedoman umum Program Jalin Matra PFK Melalui pelaksanaan kebijakan ini dengan sistem yang selalu diperbarui untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan yang ada, permasalahn KRTP tersebut akan dapat di atasi khususnya di Kabupaten Blitar.

Secara khusus, di desa Pakisaji Kecamatan Kademangan merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan program Jalin Matra PFK. Berdasarkan pendapat Riant Nugroho (2008:45) tujuan kebijakan publik pada intinya adalah untuk stabilisasi dan regulasi artinya untuk mengatur dan menstabilkan suatu keadaan yang kacau. Setiap program atau kebijakan pastilah mempunyai tujuan tertentu, tidak terkecuali kebijakan Jalin Matra PFK bagi KRTP. Tujuan kebijakan Jalin Matra PFK untuk KRTP di Kabupaten Blitar secara umum antara lain :

1) Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap krtp melalui optimalisasi peran kader TP-PKK sebagai *mother care* bagi krtp
2) Untuk memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan asset/usaha pendapatan keluarga,
3) Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi KRTP untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar,
4) Mendorong motivasi berusah dan kemampuan KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahterannya.

Dengan adanya tujuan yang harus dicapai, pelaksana dalam kebijakan ini mempunyai ukuran yang jelas untuk melakukan usaha-usaha dalam mencapai tujuan. Jadi, fokus atau konsentrasi selama perumusan, pelaksanaan hingga pengawasan implementor menuju pada ketiga tujuan utama kebijakan ini. Wiliam Dunn dalam Winarno (2007: 32-34) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan antara lain, penyusunan agenda, formulasi kebijakan dimana tahap-tahap dimana alternatif-alternatif itu dipilih, pembuatan kebijakan, tahap dimana ketika suatu keputusan harus di ambil ataupun tidak, implementasi kebijakan tahap dimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan evaluasi kebijakan tahap dimana kebijakan tersebut dinilai. Penyusunan agenda kebijakan adalah tahap dimana suatu masalah menjadi titik fokus atau perhatian pemerintah. Dalam kebijakan program Jalin Matra PFK untuk KRTP di Kabupaten Blitar dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Tahap evaluasi dijalani seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu dengan melakukan sidak ke desa-desa yang menerima bantuan ini demi tercapainya tujuan penuh kebijakan ini.

Menurut James Anderson dalam Soenarko (2005:64-65) ada beberapa tipe kebijakan publik antara lain *Distributive Policy, Regulatory policy, Self-Regulatory policy* dan *Redistributive policy.* Kebijakan pemberian program Jalin Matra PFK di desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar ini merupakan tipe *material policy* karena program ini berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang mempunyai manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran program ini.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012: 139) implementasi kebijakan yaitu merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Kemudian Winarno (2007: 145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan *(benefit),*atau suatu jenis keluaran yang nyata *(tangible ouput)*, sedangkan dalam buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik tersebut Agustino (2008:139), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

> "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".

Hal ini berarti tanpa adanya tahap pelaksanaan kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan bisa mencapai tujuan yang ingin di capai. Sebuah implementasi kebijakan harus ada agar ketercapaian kebijakan dapat diukur guna menghasilkan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan program yang lebih baik lagi. Demikian pula kebijakan Program Jalin Matra PFK untuk KRTP ini dilaksanakan dari awal tahun 2017 sehingga telah mengalami perubahan lebih baik lagi.

Hal lain yang begitu krusial daripada sebuah kebijakan adalah adanya unsur-unsur kebijakan yang menurut Tachjan (2006: 26-36), meliputi pelaksana, program dan kelompok sasaran. Ketiga unsur ini wajib ada agar suatu kebijakan harus dijalankan. Jika salah satu unsur kebijakan ini tidak ada

maka suatu kebijakan tersebut akan cacat dan tidak bisa dilanjutkan ke tahap pelaksanaan. Seperti halnya kebijakan Jalin Matra PFK untuk KRTP. Pelaksana kebijakan meliputi Pemerintah Kabupaten Blitar yang melakukan penghimpunan dana, mengelola serta melakukan pendristribusian ke seluruh desa-desa yang menerima bantuan Progam Jalin Matra PFK, kemudian pemerintah Kabupaten Blitar khususnya koordinator jalin matra pfk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) , pihak desa meliputi Kepala desa, Ketua Jalin Matra PFK dan pendamping desa yang menjadi menjadi pelaksana di lapangan dan langsung berhadapan dengan kelompok sasaran. Sasaran kebijakan merupakan Kepala Rumah Tangga Perempuan yang telah terdaftar *database* sebagai peserta. Sedangkan program yang dilaksanakan juga telah jelas di atur oleh dasar hukum berupa Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Jalin Matra PFK Tahun 2017.

Kemudian William N. Dunn (2003:215) dalam mendefiniskan evaluasi sebagai prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari serangkaian aksi di masa lalu dan atau di masa depan. Artinya sebuah tahap evaluasi kebijakan merupakan sebuah tahap yang tidak kalah penting dengan tahap sebelumnya yaitu tahap implementasi kebijakan. Melalui hasil dari sebuah proses implementasi kebijakan sebuah kebijakan akan diketahui baik buruknya hasil serta berhasil atau gagalnya dari sebuah pelaksanaan kebijakan tetapi lebih dalam lagi dari sebuah evaluasi kebijakan akan diketahui mengenai rekomendasi, masukan

maupun penilaian atas adanya implementasi kebijakan yang nantinya akan bermanfaat untuk kebaikan pelaksanaan kebijakan di masa yang akan datang.

Dengan adanya tahap evaluasi, kebijakan Jalin Matra PFK bagi KRTP maka akan didekteksi kendala-kendala yang menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. melalui tahap evaluasi kebijakan atas pelaksanaan kebijakan Jalin Matra PFK ini maka akan dapat dideteksi apakah prosedur yang telah dijalakan sudah sesuai prosedur yang telah ditetapkan, apakah kelompok sasaran juga sudah sesuai dengan kelompok sasaran yang disepakati sebelumnya.

Seperti yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, secara umum kebijakan Jalin Matra PFK untuk KRTP telah di lakukan sejak bulan dua tahun 2017 hingga tahun 2019. Umur kebijakan yang hampir 3 tahun adalah waktu yang tepat untuk diadakan penilaian terhadap pelaksanaan program. Fokus dalam penilaian atau evaluasi kebijakan ini adalah sejauh mana pelaksanaan kebijakan ini mencapai tujuan utamanya yaitu untuk memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan asset/usaha pendapatan keluarga, membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi KRTP untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, mendorong motivasi berusaha dan kemampuan KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahterannya.

Penting untuk mengetahui penilaian mengenai pelaksanaan kebijakan Jalin Matra PFK di desa Pakisaji Kecamatan kademangan karena hasil evaluasi nanti akan digunakan untuk mengetahui hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan hingga ketepatan sasaran atau output dari kebijakan ini apakah benar-benar mengenai kelompok sasaran. Suatu kebijakan yang telah diimplementasikan harus menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. William N. Dunn (2003: 617) mengemukakan beberapa kriteria dalam menilai kinerja kebijakan, sebagai berikut :

a. Efektifitas *(effectiveness)*

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif yang dipilih untuk mencapai tujuan dari kebijakan Program Jalin Matra PFK yang ditetapkan. Artinya alternatif kebijakan yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan inklusif di lokasi penelitian mampu mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan bahwa dalam pelaksanaan Program Jalin Matra PFK di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan secara umum maupun di lokasi penelitian dirasa belum mencapai secara keseluruhan. Hal tersebut bertentangan dengan teori Merilee S. Grindle (dalam Agustino,2012: 139) mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah tujuan program tersebut tercapai. Namun pada faktanya dalam pelaksanaanya ditemukan kendala terkait dengan tujuan program jalin matra pfk yaitu untuk memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan asset atau usaha pendapatan keluarga, kendalanya KRTP di desa pakisaji setiap harinya masih sulit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena di desa

pakisaji masih sepi dan bagi peternak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kentungan. Hal ini yang menghambat kercapaian tujuan dari pada pelaksanaan kebijakan ini secara penuh di desa Pakisaji Kecamatan Kademangan. Hal ini tidak bisa di antisipasi oleh pihak desa setempat karena bantuan ini sudah disesuaikan dengan apa yang diminta oleh KRTP. Disisi lain adanya program Jalin Matra PFK tersebut berdampak positif yaitu telah berhasilnya dalam memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap KRTP melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai *mothercare*, membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi KRTP untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, Mendorong motivasi berusaha dan kemampuan KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahterannya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas program Jalin Matra PFK di Desa Pakisaji Kecmatan Kademangan belum maximal. Dikarenakan tujuan yang hendak dicapai masih jauh dari harapan meskipun ada sisi positif yang ditimbulkan dari program tersebut.

b. Efisiensi *(efficiency)*

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa yang ada di lapangan bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari program ini ialah sosialisasi sampai tanggungjawab dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa sudah berhasil dan masing-masing KRTP sudah menerima batuan berupa barang atau modal senilai Rp. 2.500.000 dipotong pajak dan memberikan pelayanan yang baik untuk KRTP. Hal tersebut bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh William Dunn (2003:617) bahwa kurang adanya

pertimbangan dalam aspek anggaran, dikarenakan modal tersebut bersifat tetap tanpa adanya kenaikan padahal kebutuhan KRTP setiap tahunnya meningkat. Sehingga diperlukan tuntutan untuk memberikan kesesuian jumlah dari segi pendanaannya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Aspek efisiensi secara umum belum maximal karena anggaran setiap tahunya tetap belum bisa meningkat, sedangka kebutuhan KRTP setiap tahunya terus bertambah. Namun disisi lain untuk mendukung pelaksanaan program ini pemerintah berupaya untuk terus memberikan sosialisasi kepada penerima program itu dari tingkat kabupaten sampai desa sudah berjalan dengan baik.

c. Kecukupan *(adequacy)*

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan dapat disimpulkan bahwa permasalahan KRTP ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada seperti KRTP yang awalnya tidak berdaya kini dengan danya program ini jadi terberdayakan. Namun Program ini perlu adanya sebuah antisipasi agar program ini menjadi semakin baik walau sistemnya suatu saat nanti akan berubah. Hal tersebut selaras dengan teori kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn (2003:671) yaitu berkenaan dengan seberapa jauh hasil atau alternatif-alternatif yang dipakai dalam pelaksanaan kebijakan Jalin Matra PFK mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Artinya melalui indikator ini akan diketahui kesesuaian antara hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan Jalin Matra PFK di Desa pakisaji Kecamatan Kademangan.

Berdasarkan pemaparan atau fakta diatas bahwa aspek kecukupan ini sudah bisa dikatakan berhasil dikarenakan adanya program Jalin Matra PFK mampu memberikan manfaat tersendiri bagi kelompok sasaran. Dimana krtp merasa diberdayakan dan membantu perekonomian krtp.

d. Kesamaan*(equity)*

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan bahwa manfaat dari kebijakan ini sudah mampu dirasakan oleh semua pihak entah dari Tim Jalin Matra PFK maupun dari Kelompok sasaran. Pada dasarnya intinya pihak pelaksana berhasil memberikan layanan terbaik untuk KRTP melalui Program ini. Dimana hal itu merupakan suatu kewajiban dan kelompok sasaran pun senang bisa menerimanya haknya yaitu Program Jalin Matra PFK dengan mudahBerkenaan dengan keadilan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kebijakan Program Jalin Matra PFK di lapangan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak entah itu implementor maupun kelompok sasaran. Dalam program jalin mantra PFK ini yang menjadi pelaksana program adalah unit pengendali program jalin mantra PFK daerah yang telah ditunjuk untuk mengawasi untuk melaksanakan tugasnya agar program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh William Dunn (2003:617) bahwa Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Pada faktanya memang secara pemerataan sudah adil dalam pendistribusian dibuktikan melalui pernyataan oleh Bapak Khoirul Anam bahwa adanya program

tersebut tidak hanya memberikan bantuan, melainkan terlibat secara aktif dan melakukan sharing terkait dengan usaha penerima bantuan Jalin Matra PFK. Berdasarkan uraian di atas maka kebijakan ini memberikan mafaat pada semua elemen yang terlibat dalam kebijakan.

e. Responsivitas *(responsiveness)*

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa semua lapisan dari lapisan pelaksana DPMD Kabupaten Blitar hingga pelaksana dari sektor terkecil yaitu desa sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan prosedur yang ada dan respon kelompok sasaran juga bagus. Hal ini ditandai dengan kerjasama kelompok sasaran yang ikut serta menjalankan kebijakan sesuai prosedur dan melapor jika ada masalah.Hal tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh William dun dalam kriteria evaluasi aspek resposivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Dimana dibuktikan dengan pernyatan Ibu Fifah selaku ketua program jalin matra bahwa responsivitas dalam hal ini yang dilakukan melalui upaya memonitoring dan menangkap aspirasi masyarakat mengenai kurangnya fasilitas modal yang diterima atau menampun pertanyaan – pertanyaan masyarakat tentang program jalin matra itu sendiri. Sedangkan di sisi lain, Namun masih ditemui krtp

yang membutuhkan belum tedaftar sebagai penerima program jalin matra pfk . Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Khoirul Anam bahwa tidak terdaftarnya KRTP yang sangat membutuhkan dikarenakan oleh data yang lama belum ter*update*.

Sehingga, dari teori dan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa aspek responsivitas secara umum belum dikatakan maximal. Meskipun secara umum tanggap terhadap aspirasi masyarakat dalam adanya program Jalin Matra PFK, disisi lain krtp yang sangat memerlukan bantuan ini belum terdaftar dan komplain kepada pihak pelaksana penyedia bantuan.

f. Ketepatan *(appropriateness)*

Berdasarkan hasil wawancara yang ada di lapangan menunjukkan bahwa alternatif-alternatif yang dipakai sangat layak untuk mencapai tujuan kebijakan ini. Namun masih ditemui kekurangan dalam kriteria ketepatan ini yaitu tidak tepat sasaran. Dimana kelompok sasaran yang sudah meninggal dunia tetap terdaftar sebagai penerima program jalin matra pfk. Namun apabila dilihat dari teori yang dikemukakan oleh William Dunn (2003 : 617) tentang kriteria evaluasi bahwa ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Hal tersebut dalam aspek ketepatan untuk melihat kuatnya asumsi yang melandasi tujuan di dasarkan pada tujuan awal dibentuknya program Jalin matra. Dimana tujuan program tersebut diantaranya untuk memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap krtp melalui optimalisasi peran kader TP-PKK sebagai *mother care* bagi krtp, Untuk memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk

peningkatan asset/usaha pendapatan keluarga, Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi KRTP untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, Mendorong motivasi berusaha dan kemampuan KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahterannya. Dari tujuan program jalin matra diatas, program jalin matra khususnya di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan telah memenuhi ketiga kriteria dari 4 tujuan program jalin matra pfk. Disi lain tidak tepat sasaran dikarenakan kelompok sasaran yang sudah meninggal tetap terdaftar menjadi penerima bantuan program Jalin Matra PFK.

Berdasarkan pemaparan diatas maka, dari aspek ketepatan dinilai belum maximal karena memang secara umum belum memenuhi dari tujuan adanya program jalin matra pfk. Meskipun sudah melakukan tahapan sesuai dengan prosedur atau pedoman umum jalin matra dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program jalan lain menuju mandiri dan sejahtera penanggulangan feminisasi kemiskinan (Jalin Matra PFK) di desa pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Belum berhasil secara maximal. Hal ini dapat dilihat dari indikator evaluasinya implementasi sebagai berikut, gagal dalam ketidak tepat sasaran dan tidak merata kesemua kepala rumah tangga perempuan. Dan berhasil dalam memeberikan bantuan sesuai dengan apa yang inginkan oleh kepala rumah tangga perempuan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Sebagai berikut :

1. Efektifitas *(effectiveness)*

   Pelaksanaa kebijakan Jalin Matra PFK di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar belum bisa dikatakan mencapai tujuan atau belum maximal . Hal ini dikarenakan walaupun dengan adanya kebijakan ini, sudah berhasil memberikan bantuan berupa barang yang diinginkan oleh kelompok sasaran sehingga bisa membantu mereka. Namun tujuan tidak sesuai dengan realita. Dimana dalam pelaksanaanya ditemukan kendala terkait dengan salah satu tujuan program Jalin Matra PFK yaitu untuk memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan KRTP terhadap usaha produktif untuk peningkatan asset atau usaha pendapatan keluarga, kendalanya KRTP di desa pakisaji di bidang

perdagangan kecil-kecilan setiap harinya masih sulit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena di desa pakisaji masih sepi dan bagi peternak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kentungan.

2. Efisiensi *(efficiency)*

Pelaksanaan program Jalin Matra PFK dari pihak koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten blitar, tim Jalin Matra PFK desa dan Desa pakisaji sudah melakukan usaha-usaha yang beragam. Dimulai dengan sosialisai sektor terkecil yang mensinergikan peran kepala desa dan tim Jalin Matra PFK desa, nenampung aspirasi secara langsung dari tim desa ataupun DPMD, dengan memberi pelayanan terbaik kepada krtp tentunya tetap mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Dalam segi waktu sudah cukup dalam waktu 1 tahun lebih. Namun masih ditemui kekurangan-kekurangan antara lain bantuan Rp. 2.500.000 dirasa masih kurang setiap tahunya apalagi masih dipotong pajak. Sedangkan kebutuan KRTP setian tahunya juga bertambah..

3. Kecukupan*(adequacy)*

Pelaksasaan dari kebijakan jalin Matra PFK untuk KRTP di Kabupaten Blitar terutama di desa pakisaji Kecamatan Kademangan dalam hal kecukupan ini sudah berhasil menyelesaikan permasalahan yang melatarbelakangi, adanya KRTP yang tidak berdaya dalam hal perekonomian dan menganggur. Kini KRTP tersebut merasa terbantu dan diberdayakan dengan baik dengan adanya Program Jalin Matra PFK ini

dengan diberikan modal berupa barang sesuai dengan keinginan KRTP untuk bisa dikembangkan sebaik mungkin.

4. Kesamaan*(equity)*

Keberadaan kebijakan Jalin Matra PFK ini memberikan manfaat bagi semua pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini mulai dari pelaksana koordinator dari DPMD Kabupaten Blitar, desa pakisaji, tim jalin matra desa yang bisa semakin efektif dan memperoleh kepercayaan yang lebih dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blitar. Khusunya melalui program Jalin Matra PFK juga telah berhasil memenuhi kewajiban dalam menjalankan amanat Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman umum Jalin Matra. Bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di jawa timur. Pihak pelaksana koordinator dari DPMD kabupaten blitar semakin dipermudah dengan adanya kebijkan ini dengan menangani penanggulangan feminisasi kemiskinan dengan pedoman jalin matra pfk secara terperinci sebagai acuan utuk memberikan layanan bagi kelompok sasaran. Demikian pula pihak desa dan tim jalin matra pfk juga diuntungkan dengan adanya kebijakan ini, karena selain telah terbantu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, melalui program ini pihak desa telah berhasil menjalin hubungan baik dengan masyarakat atau KRTP dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Demikian juga kelompok sasaran, mendapat keuntungan karena mendapatkan modal usaha untuk dikembangkan.

5. Responsivitas *(responsiveness)*

   Pelaksanaan kebijakan ini dalam kriteria responsivitas sudah berjalan dengan baik dalam pelaksana dari sektor teratas yaitu pemerintah Kabupaten Blitar hingga terbawah yaitu kepala desa beserta tim jalin Matra PFK Desa Pakisaji telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya antara lain sosialisasi, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan atau monitoring serta jaring aspirasi terkait dengan kelemahan program ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Namun dalam hal responsivitas ini masih ditemui beberapan orang krtp yang belum terdaftar sebagai penerima program jalin Matra PFK komplain atau mengajukan aspirasi mereka bahwa masih ada KRTP yang membutuhkan bantuan ini tetapi tidak terdaftar sebagai penerima.

6. Ketepatan *(appropriateness)*

   Alternatif yang dipilih untuk mencapai tujuan kebijakan dari tahap sosialisasi, sistem penganggaran, tanggungjawab, hingga pengawasan atau monitoring dirasa sangat layak untuk mencapai tujuan Jalin Matra PFK. Namun masih ditemui kekurangan dalam pelaksanaan ini dalam kriteria ketepatan yaitu tidak tepat sasaran. Dimana kelompok sasaran yang sudah meninggal tetap terdaftar sebagai penerima program Jalin Matra PFK.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan, yaitu :

a. Peningkatan akses tujuan KRTP yang belum dicapai

Untuk memenuhi dari tujuan program Jalin Matra PFK Pemerintahaan melalui peningkatkan akses jaringan dan akses informasi untuk meningkatkan produktivitas dari hasil usaha KRTP. Dengan meningkatkan akses ini nantinya keuntungan yang diperoleh KRTP lumayan banyak.

b. Peningkatan Efisiensi *(efficiency)*

Jumlah bantuan sangat perlu ditingkatkan. Dengan menyesuaikan kebutuhan sehari-hari krtp yang terus bertambah. Dengan cara pemerintah menambah anggaran sesuai dengan penerima program Jalin Matra PFK untuk KRTP yang ada di desa pakisaji.

c. Peningkatan Responsivitas *(responsiveness)*

Peningkatan responsivitas sangat diperlukan untuk menampung aspirasi masyarakat khusunya KRTP yang ada di desa pakisaji kecamatan kademangan. Sehingga dengan adanya hal ini nantinya pihak desa bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai program jalin matar pfk.

d. Memperbarui data *(Updating Data)*

Perlu adanya Memperbarui data *(Updating Data).* Hal ini dilakukan dengan sensus dan mendata warga masyarakat khususnya KRTP, agar bisa mengetahui langsung mana yang seharusnya benar-benar dinilai pantas untuk menerima bantuan program Jalin Matra PFK dan yang seharusnya tidak menerima bantuan ini. Dengan *Updating Data* maka setiap tahunya akan muncul wajah-wajah baru KRTP penerima bantuan

Jalin Matra PFK. Sehingga bantuan merata ke semua KRTP yang membutuhkannya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo.2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabetha.

Damsar. 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Kencana.

Daulay, Murni. 2009. *Kemiskinan pedesaan*. Medan : USU Press.

Dunn, Wiliam N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fernandez, Joe. 2000. *Anggaran Pro-Kaum Miskin*. Jakarta :LP3S.

Hamdi, Muchlis.2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Islamy, irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta

Khomsan, Ali. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta :Fakultas Ekologi IPB.

Kuncoro, Mudrajad.2004.*Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods, Sourcebook, Edition 3*. USA : Sage Publication. Terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi, UI Press.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moghdam, V.M. 2005. *Globalizing women: Transnational feminist network*. MD: The Johns Hopkins University Press. Baltimore.

Nasikun. 2001. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Yogyakarta :Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

Nawawi, Hadari.2003. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universita Press.

Nugroho, Rian.2008. *Public Policy: Teori Kebijakan- Analisis Kebijakan- Proses* . Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Nugroho, Rian. 2011. Public Policy: *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan. Edisi Ketiga.* Jakarta: Elex Media Komputindo,

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti.2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.

Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh : Red

Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta :Jarnasy

Soenarko. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis Kebijaksanaan Pemerintah.* Surabaya : Airlangga University Press.

Soeharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung*: Alfabetha.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabetha.

Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Syachbrani.2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Tim BPS. 2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur*. Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur.

Tim DPMD Jawa Timur. 2017. *Media Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (edisi 4)*. Surabaya: DPMD Provinsi Jawa Timur.

Tjahjan.2006. *Implementasi Kebijakan Publik*: Bandung: AIPI.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra.2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widodo, Joko.2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyu Media Publishing.

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang RPJMP 2005-2025

Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Jalin Matra.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 1. Surat Riset

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 4243.../UN10.3.F03.11/PN/2019
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/ Ibu Kepala Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Malia Diah Wijayanti
Alamat : Dsn. Jaitirejo Rt 02/ Rw 11, Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66161
NIM : 155030107111011
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminasi Kemiskinan di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
Lokasi : Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
Waktu : April 2019 s/d Juni 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu. kami ucapkan terima kasih.

Malang, 15 April 2019

a.n Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik

Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
NIP 19670217 199103 1 010

Formulir di buat rangkap 4 untuk :
1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 4343/UN10.3.F03.11/PN/2019
Lampiran : -
Hal :Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/ Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Di Jl.Nias No.2, Sananwetan, Kota Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Malia Diah Wijayanti
Alamat : Dsn. Jaitirejo Rt 02/ Rw 11, Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66161
NIM : 155030107111011
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminasi Kemiskinan di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
Lokasi : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
2. Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
Waktu : April 2019 s/d Juni 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 15 April 2019

a.n Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik

Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
NIP 19670217 199103 1 010

Formulir di buat rangkap 4 untuk :
1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

[redacted]

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kriteria Efektivitas

Untuk pelaksana :

1) Apakah Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin miskin sudah mencapai tujuan yang telah diharapkan ?
2) Apa saja kendala-kendala yang Anda temui dalam pelaksanaan Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin miskin ?

Untuk kelompok sasaran :

1) Apakah Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin sudah mencapai tujuan yang telah diharapkan ?
2) Apakah yang Anda harapkan dari Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin selama ini ?

B. Kriteria Efisiensi

Untuk pelaksana :

1) Upaya-upaya apa saja yang dipakai untuk mencapai tujuan Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin miskin ini ?
2) Bagaimana pengelolaan sumber daya anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin ini ?
3) Apakah sumber daya waktu yang diberikan cukup dalam proses pelaksanaan Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin ini ?
4) Apakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sudah dipenuhi dalam pelaksanaan Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin ini ?

Untuk kelompok sasaran :

1) Bagaimana pendapat anda mengenai upaya-upaya kebijakan yang dipakai pelaksana dalam pelaksanaan Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin ?
2) Bagaimana sarana dan prasarana penunjang yang digunakan? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan ?

C. Kriteria Kecukupan

Untuk pelaksana :

[redacted]

1) Apakah hasil dari Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin sudah berhasil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada?

Untuk kelompok sasaran

1) Apakah Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang ada ?

D. Kriteria Perataan

Untuk pelaksana :

1) Menurut Anda apakah manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan ini cukup adil sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini ?
2) Selama proses pelaksanaan kebijakan, apakah manfaatnya sudah benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu pihak pelaksana maupun pihak kelompok sasaran ?

Untuk kelompok sasaran :

1) Menurut Anda apakah manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan ini cukup adil sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak ?
2) Selama proses pelaksanaan kebijakan, apakah manfaatnya sudah benar-benar dapat dirasakan oleh pihak Anda sebagai pihak kelompok sasaran ?

E. Kriteria Responsivitas

Untuk pelaksana :

1) Apakah wujud tanggungjawab Anda sebagai upaya pencapaian tujuan kebijakan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin ini ?
2) Bagaimana respon, tanggapan maupun pandangan masyarakat umum terhadap pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin ini ?
3) Bagamana respon, tanggapan dan pandangan kelompok sasaran dengan adanya Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin ini ?

Untuk kelompok sasaran :

1) Apakah bentuk partisipasi Anda untuk membantu memperlancar pencapaian tujuan Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin ini ?
2) Bagaimana tanggapan Anda tentang adanya Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin miskin ini? Apakah mendukung atau justru

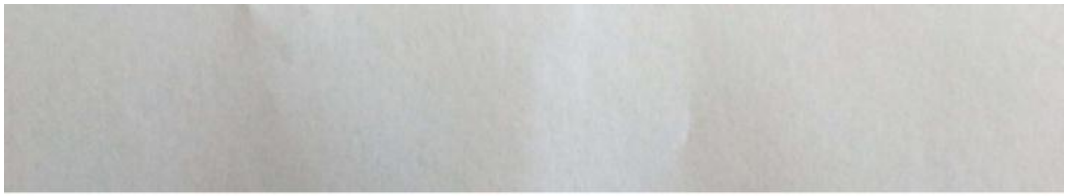

menolak karena dalam pelaksanaan mungkin ditemui berbagai permasalahan baru ?

F. Kriteria Ketepatan

Untuk pelaksana :

1) Apakah upaya-upaya yang dipilih dalam melaksanakan Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin selama ini merupakan upaya-upaya rekomendasi yang layak ?

Untuk kelompok sasaran :

1) Apakah cara yang dipakai pemerintah dan pelaksana kebijakan yang dipakai pemerintah adalah upaya yang tepat untuk mencapai tujuan Program Jalin Matra PFK untuk perempuan miskin ini ?

Lampiran 3. Pedoman Umum Jalin Matra PFK Tahu 2017

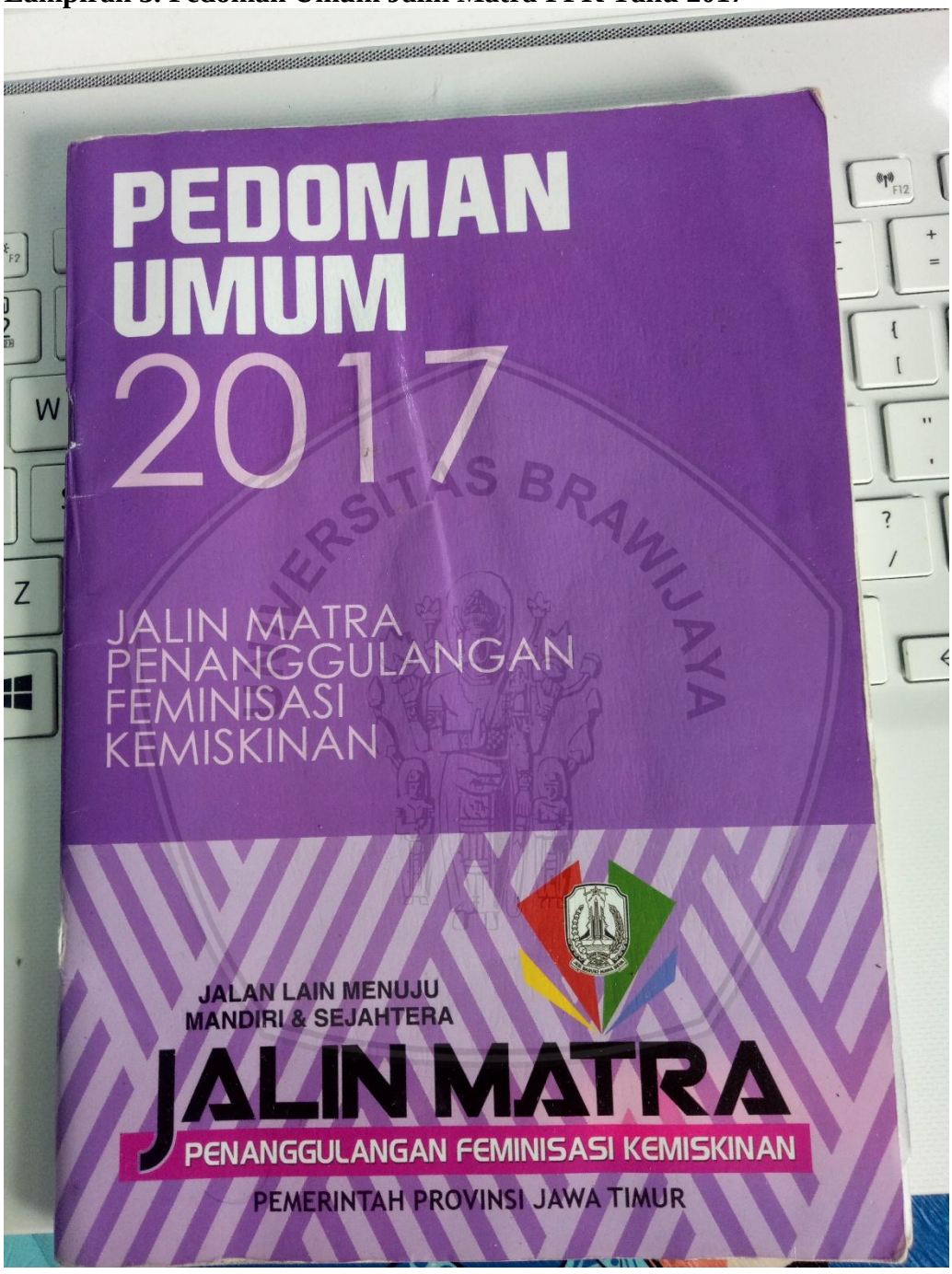

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 4. Dokumentasi wawancara dengan Informan Peneliti

Wawancara dengan Bapak Khoirul Anam, selaku Koordinator Jalin Matra PFK dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Sumber: Peneliti, 2019.

Wawancara dengan Ibu Fifa Ketua Jalin Matra PFK dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan
Sumber : Peneliti, 2019.

Wawancara dengan Ibu Yumelda Pendamping Jalin Matra PFK Ddesa Pakisaji Kecamatan Kademanga
Sumber : Peneliti, 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Wawancara dengam Ibu Sarmi Penerima Jalin Matra PFK Peternak Kambing
Sumber : Peneliti, 2019.

Wawancara dengan Ibu Kasini Penerima bantuan berupa Sembako
Sumber: Peneliti, 2019.

Wawancara dengam Ibu Sukirah Penerima Jalin Matra PFK bahan-bahan pembuat kue
Sember: Peneliti, 2019.

Wawancara dengan Ibu Siti Penerima Program Jalin matra PFK berupa Kelapa
Sumber: Peneliti, 2019.